KHAIRIL ANWAR dkk.

GEOPOLITIK PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

Sebuah Survei tentang Politik Identitas menurut Perspektif Ulama di Kalimantan Tengah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PALANGKA RAYA

KALIMANTAN TENGAH – INDONESIA

https://iain-palangkaraya.ac.id

GEOPOLITIK

PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

Sebuah Survey Politik Identitas
Menurut Prespektif Ulama di Kalimantan Tengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 1:
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:
1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana
Pasal 113:
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegan g Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 000,- (empat miliar rupiah).

Pasal 114
Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

GEOPOLITIK

PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

Sebuah Survey Politik Identitas
Menurut Prespektif Ulama di Kalimantan Tengah

Dr.H.Khairil Anwar, M.Ag.
Dr.H.Ahmad Syar'i, M.Pd.
H.Fimeir Liadi, M.Pd.

Geopolitik Pemilihan Presiden Tahun 2019
(Sebuah Survey Politik Identitas Menurut Prespektif Ulama di Kalimantan Tengah)

Dr.H.Khairil Anwar, M.Ag, Dr.H.Ahmad Syar'i,M.Pd, H.Fimeir Liadi,M.Pd

ISBN 978-602-53986-6-7

©2019 Penerbit IAIN Press Palangkaraya
Anggota IKAPI dan APPTI

Layout Sahidul Muslifin

Dicetak oleh:
CV. KANAKA MEDIA
Surabaya, Jawa Timur
Email: cv.kanakamedia@gmail.com
IG : katalog_knk
FB: Kanaka Media
Telp/WA: 0895384076090

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Kontestasi Pemilihan Presiden 2019 di Era Industri 4.0 tampaknya sangat menarik untuk diteliti, khususnya terkait dengan kegiatan Politik Identitas Keagamaan. Ada dua calon calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni pasangan Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin yang bernomorkan 01 di satu sisi; dan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga S. Uno yang bernomorkan 02 di sisi yang lain. Kedua pasangan itu mencoba merebut hati para ulama yang tidak hanya berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tapi juga dari para ulama kultural dan para *habaib*.

Tulisan yang diambil dari hasil penelitian ini menggali lebih dalam apakah Pilpres 2019 ini masih akan terpapar dengan Politik Identitas, terutama Ulama dan tokoh-tokoh Islam. Ada tiga rumusan masalah yang akan dicari jawabnya yaitu bagaimana pandangan ulama Kalimantan Tengah terhadap politik identitas pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019?,bagaimana peran ulama Kalimantan Tengah terhadap Politik Identitas dalam mempengaruhi pemilih dalam kontestasi Pilpres Tahun 2019? dan bagaimana upaya MUI dalam menciptakan suasana kondusif masyarakat pasca Pileg dan Pilpres 2019

Pada kesempatan ini, tim peneliti/Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor IAIN Palangkaraya, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Palangkaraya yang telah memberikan fasilitas dana Penelitian hingga tulisan ini bisa hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai salah satu informasi cerminan politik di Kalimantan Tengah.

Demikian pula kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Staf KPU Provinsi, Kota dan Kabupaten yang memberikan info bermanfaat dalam penggalian data, wabil khusus kepada Majelis Ulama Indonesia baik Pimpinan Daerah Provinsi maupun Kota dan Kabupaten, serta tokoh agama, alim ulama, para ustadz yang meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh Peneliti sebagai data utama tulisan ini.

Harapan kami buku ini bisa bermanfaat, memberikan pencerahan kepada masyarakat baik dalam konteks berpolitik maupun beraktivitas social lainnya

Palangkaraya, Juli 2020

Tim Peneliti

Wassalam

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI..... vii
BAB I KONDISI POLITIK INDONESIA TERKINI..... 1
BAB II TENTANG POLITIK IDENTITAS 6
A. Hakikat Politik Identitas..... 6
B. Politik Identitas dan Fundamentalisme 28
C.Politik Identitas dan Ulama..... 35

BAB III KAJIAN KEWILAYAHAN..... 43
BAB IV POLITIK IDENTITAS DI MATA ULAMA..... 50
A. Pandangan Ulama Kalimantan Tengah terhadap Politik Identitas pada kontestasi Pemilihan Presiden tahun 2019..... 50
B. Peran Ulama Kalimantan tengah terhadap Politik Identitas dalam mempengaruhi pemilih dalam kontestasi Pilres tahun 2019..... 80
C. Upaya Ulama dalam mendinginkan suasana umat Pasca Pilpres 2019 90

BAB V FENOMENA POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN PRESIDEN..... 105
A. Realita Politik Identitas di Pemilu Presiden..... 105
B. Efek Politik Identitas sebagai Realitas Sosial..... 114
C. Upaya Penenang Kembali Suasana masyarakat 117

BAB VI PENUTUP 120
DAFTAR PUSTAKA..... 123

BAB I
KONDISI POLITIK
INDONESIA TERKINI

Politik identitas dan demokrasi kebangsaan adalah tema yang menarik untuk diangkat dalam realitas kekinian bangsa Indonesia, khususnya dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2019 sekarang ini. Politik identitas, khususnya identitas agama dan keagamaan menjadi ramai diperbincangkan dan didiskusikan oleh para ahli, ilmuan, dan ulama. Apalagi setelah munculnya kasus Ahok (Basuki Purnama) yang dinilai menista agama dan ulama menjelang Pemilihan Gubernur DKI 2017; dan terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang cenderung phobia terhadap orang-orang yang beragama Islam.

Dua kasus di atas mengundang berbagai komentar dan pendapat. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa politik identitas, termasuk identitas agama dan keagamaan dapat merusak demokrasi dan mengancam integrasi bangsa. Ilmuan

dan para pakar yang berpandangan seperti itu antara lain Ahmad Syafi'i Ma'arif[1] dan Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko (Kompas, Januari 2017).[2] Namun, di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa politik identitas itu dibolehkan,[3] sepanjang tidak merusak demokrasi dan mengancam integrasi bangsa. Sehingga politik identitas itu tidak selalu dipandang negatif mengancam keutuhan bangsa, melainkan ia dapat menjadi sebuah potensi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui kemampuan untuk mengaplikasikan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dan memperhatikan etika politik dan komitmen terhadap NKRI.[4] Lebih dari itu, identitas itu sendiri adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia.[5]

---

[1]Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta: Democracy Project, 2012.

[2]Lihat Moeldoko, Politik Identitas Merusak Demokrasi", dalam *Kantor Staf Presiden (ksp.go.id)*, 04 Juni 2018.

[3]Lihat komentar Mahfud MD, "Kritik Kempanye Gatot Nurmantyo di Sumatera Utara" dalam *Tribun Pekan Baru. Com*, tanggal 27/06/2018. Mahfud MD mengatakan: "Memilih berdasarkan ikatan primordial semisal kesukuan, agama, dan kedaerahan pastinya bisa sesuai dengan kesadaran dan identifikasi diri masing-masing warga negara. Politik ikatan primordial itu tidak bisa dibilang sebagaii keharusan, tapi mubah atau dibolehkan. Hanya saja keutuhan bangsa dan Negara harus dinomorsatukan.

[4]Lihat juga Nur Syamsi, Imam Masjid Besar New York, menilai bahwa politik identitas bukanlah sesuai yang baru, melainkan sudah terjadi di jaman Nabi dan Sahabat. Menurut QS al-Hujurat ayat 13, manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Dan, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang lebih bertakwa. Menurutnya, memilih karena pertimbangan agama dan keagamaan adalah bagian dari kepentingan nasional. Lihat Nur Syamsi, "Politik Identitas, Mengkhawatirkankah?" dalam *Republika, co.id*, 25 April 2018.

[5]Din Syamsuddin, "Politik Identitas SARA Melekat di Diri Manusia, dalam *Detik News*, 3 Juli 2018. Menurut Din Syamsuddin, kelompok atau seseorang yang mengusung

Kontestasi Pemilihan Presiden 2019 tampaknya sangat menarik untuk diteliti. Ada dua calon calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni pasangan Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin yang bernomorkan 01 di satu sisi; dan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga S. Uno yang bernomorkan 02 di sisi yang lain. Kedua pasangan itu mencoba merebut hati para ulama yang tidak hanya berasal dari kalangan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, tapi juga dari para ulama kultural dan para habaib.

Munculnya fenomena ulama dan habaib yang memberikan dukungan secara terbuka dan sembunyi-sembunyi kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah terlihat dengan jelas pada Pilpres 2019. Dan, dukungan ulama dan habaib terhadap pasangan Capres tertentu sedikit banyaknya mereka menggunakan politik identitas dan dapat mempengaruhi pemilih di kalangan umat Islam.

Calon wakil presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah seorang ulama yang menjabat Ketua Umum MUI Pusat dan Rais

---

politik identitas tidak jadi masalah selama disampaikan dengan cara serta tujuan yang baik. Menurutnya, SARA melekat dalam diri manusia dan tidak mungkin dilepas. Yang tidak baik, kalau identitas atau ikatan primordial diekspresikan dengan cara negatif, ekslusif, egois, dan monopolistik, menyebar hoaks dan ujaran kebencian.

Syuriyah PBNU dan didukung oleh ulama yang berasal dari Nahdhatul Ulama. Sebaliknya, capres dan cawapres Prabowo Subiyanto dan Sandiaga S. Uno didukung oleh para ulama dan habaib yang tergabung dalam alumni 212 dan didukung oleh Habib Rizieq Shihab (HRS), dalam Ijtima' Ulama II. Sedangkan para ulama dan cendekiawan muslim yang tergabung dalam wadah Muhammadiyah tampaknya bersifat netral secara organisasi, tapi secara perorangan dipersilahkan kepada masing-masing individu untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya. Namun menarik, salah satu kader Muhammadiyah seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah) ternyata mendukung dan menjadi koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Parnowo Subianto-Sandiaga Uno.

Fenomena dukung mendukung capres cawapres tahun 2019 tersebut, tampaknya merembet juga ke ulama di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal ini terbukti dengan fenomena postingan di media sosial. Ada individu ulama yang cenderung mendukung Capres-Cawapres No 01 dan mempengaruhi pemilih lainnya. Tapi, ada pula ulama yang mendukung Capres Cawapres No 02 dan mempengaruhi pemilih lainnya.

Melalui politik identitas agama dan keagamaan, ulama dinilai juga berperan dalam menghimbau dan mengajak para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan sekaligus mengurangi golongan putih (golput). Sebab, menurut data KPU Kalimantan Tengah penggunaan hak pilih di Kalimantan Tengah dalam Pilpres dan Pileg Tahun 2014 yang lalu 65%. Sementara penggunaan hak pilih dalam pemilihan walikota Tahun 2018 yang lalu 66,12%. Padahal target nasional sebanyak 77,5%. Artinya, peran ulama juga diharapkan untuk menghimbau umatnya agar menggunakan hak pilihnya meskipun sedikit banyaknya menggunakan politik identitas agama dan keagamaan.

BAB II
TENTANG POLITIK IDENTITAS

A. Hakikat Politik Identitas

Sebagai suatu konsep yang sangat mendasar, apa yang dinamakan identitas tentunya menjadi sesuatu yang sering kita dengar. Terlebih lagi, ini merupakan konsep yang menjadi basis untuk pengenalan sesuatu hal. Kita akan mengenali sesuatu halnya itu kalau kita tahu identitasnya. Ini juga akan berarti bahwa kalau kita mengenali identitas sesuatu hal, maka kita akan memiliki pengetahuan akan sesuatu halnya itu.

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka

setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994[6]

Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan *belonging* tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas[7]. Namun demikian, sebenarnya akan lebih mudah bila kita memahami konsep identitas ini dalam bentuk contoh. Ketika seseorang lahir, ia tentu akan mendapatkan identitas yang bersifat fisik dan juga non-fisik. Identitas fisik yang terutama dimiliki adalah apakah ia berjenis kelamin pria atau wanita. Sedangkan untuk identitas non-fisik adalah nama yang digunakan, juga status yang ada pada keluarga pada saat dilahirkan.

Identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan *(citizenship)*). Identitas sosial menentukan posisi subjek di

[6] Ubed Abdillah, Politik identitas Etnis, Pergaulan Tanda Tanpa Identitas, Magelang Indonesia Tera, 2002 hal.16

[7] https://docplayer.info/44690730-Tinjauan-pustaka-a-politik-identitas-sebagai-suatu-konsep-yang-sangat-mendasar-apa-yang-dinamakan-identitas.html

dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan *(sense of bellonging)* dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan *(sense of otherness)*.

Identitas politik *(political identity)* secara konseptual berbeda dengan "politik identitas" *(politica of identity)*. Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik. Secara sederhana, apa yang dimaksud identitas didefinisikan sebagai karakteristik esensial yang menjadi basis pengenalan dari sesuatu hal. Identitas merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang menjadi titik masuk bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenalkan mereka . Ini adalah definisi umum yang sederhana mengenai identitas dan akan kita pakai dalam pembahasan berikutnya mengenai politik identitas.

Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari „sense (rasa/kesadaran) terhadap ikatan

kolektivitas". Dari pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan *otherness* (keberbedaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda *(categories of difference)*[8].

Identitas selalu melekat pada setiap individu dan komunitas. Identitas merupakan karekteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain

Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang. Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu: *Pertama* Primodialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun. *Kedua* Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-

[8] Ari Setyaningrum, Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas dlam Wacana Politik Poskolonial dalam Politik Perlawanan" Yogyakarta,IRE.2003 hal.26

ikatan kultural dalam masyarakat. *Ketiga*. Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan[9].

Politik identitas bisa dikatakan terjadi di setiap kelompok atau komunitas, salah satunya yang terjadi dalam serial film Upin dan Ipin.

Masing-masing individu yang memiliki identitas pribadi yang berbeda dari suku, etnis dan agama telah bergabung menjadi satu komunitas yang memiliki identitas kolektif. Walaupun mereka memiliki identitas kolektif sebagai warga negara Malaysia yang sah, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tetap memiliki ego untuk memperjuangkan identitas pribadinya. Disinilah terjadi persaingan antar individu dalam suatu komunitas yang ada dalam film Upin dan Ipin ini. Hal ini disebut sebagai politik identitas Menurut Cressida Heyes (*Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman- pengalaman ketidakadilan yang

[9] Ari Setyaningrum, Hal. 14-15

dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu[10]

Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afilisasi kepartaian, politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini Cressida Heyes beranggapan jika politik identitas lebih mengarah kepada kepentingan terhadap individu atau kelompok yang terpinggirkan dari pada pengorganisasian.

Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan *(difference)* sebagai suatu kategori politik yang utama[11] .Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing. Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar

[10] (*www.assignmentfilzaty.blogspot.com*)

[11] Ubed Abdillah, Politik identitas Etnis, Pergaulan Tanda Tanpa Identitas, Magelang Indonesia Tera, 2002 hal.16

individu yang sama-sama memiliki ego dan tujuan pribadi. Sehingga menyebabkan pergeseran kepentingan terkait dengan perebutan kekuasaan dan persaingan untuk mendapatkan posisi strategis bagi tiap individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa politik identitas menurut peneliti adalah suatu tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memliki kesamaan identitas baik dalam hal etnis, jender, budaya, dan agama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya. Politik identitas sering digunakan untuk merekrut dukungan orang-orang yang termarjinalkan dari kelompok mayoritas.

Konteks keterwakilan politik belum meluas dan menginstitusinya partisipasi dan keterwakilan politik masyarakat secara komprehensif telah memicu munculnya kebijakan yang diskriminatif dan eksklusif yang pada akhirnya memperkuat alasan kebangkitan politik identitas etnik. Menurut Barker , karena terdorong perjuangan politik serta minat terhadap filsafat dan bahasa, 'identitas' berkembang menjadi tajuk utama kajian budaya di era 1990-an. Politik feminisme, etnisiti, dan orientasi seks, juga tajuk-tajuk lain,

menjadi minat utama yang memiliki kaitan rapat dengan politik identitas.[12]

Merujuk kepada Eriksen dalam Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z Rubin. (2004) bahwa apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pada semua masyarakat sedang terjadi perubahan identitas sosial dan budaya. Kata dia, sekurang-kurangnya dalam sepuluh tahun terakhir menjelang abad ke 20, kita dapat melihat secara dramatis rekonseptualisasi konsep kebudayaan dan masyarakat dalam studi-studi ilmu sosial.[13]

Sampai tahun 1960-an terjadi tumpang tindih antara kebudayaan dan etnitas (diasumsikan bahwa identitas ditentukan oleh etnisitas, sejauh etnik memelihara kekhasan kulturalnya) dengan masalah kewarganegaraan (status kebangsaan seseorang). Namun, kurang lebih tiga puluh tahun berlalu atau sekitar tahun 1990-an, mulai terlihat sebuah perubahan yang sangat cepat di mana kita tak bisa lagi menunjukan hubungan langsung antara kebudayaan dan etnisitas. Artinya, identitas etnik belum tentu ditunjukan lagi oleh kebudayaan dari etnik itu. Menurut Thomas dalam Alo (2003) , yang sedang terjadi kini adalah meningkatnya

[12]Chris Barker, *Cultural Studies, Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 1999), 217.

[13]Dean G dan Jeffrey Z Rubin Pruitt, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 10.

perbedaan budaya kini berubah menjadi identitas etnik sebagai identitas budaya kini berubah menjadi identitas budaya "baru" atau sekedar sebagai identitas sosial semata-mata. Seterusnya Eriksen menjelaskan bahwa apa yang digambarkan itu menunjukan sekurang-kurangnya dua isu yang selalu terus diperdebatkan. *Pertama*, bahwa selalu ada kontroversi tentang primordialisme dan instrumentalisme. Ini dikarenakan, identitas etnik pada galibnya merupakan sesuatu yang bersifat "primordial", yang semula berakar pada kebudayaan yang dihayati bersama secara kolektif baru" akibat asimilasi dua atau lebih budaya yang didukung oleh perkawinan (amalgamasi) maupun komunikasi antarbudaya ditempat kerja, sekolah, dan lain-lain (baca juga Abner Cohen mengenai etnisitas keturunan Afrika di AS).[14]

Kolektiva komunitas baru itu dihasilkan oleh keberhasilan mereka memanipulasi simbol-simbol komunikasi bersama yang baru atau menafikan simbol-simbol budaya yang asli dan asal (lihat kasus Sunita Puri diatas, mempertahankan *bindi* sebagai simbol etnik orang indian atau kita dapat membuat *bindi* sendiri dengan membeli cat ditoko). Jadi, perdebatan ini berkaitan dengan dikotomi antara

[14]Alo Liliweri, *Dasar-dasar Komunikasi antar Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 68.

mempertahankan karakteristik kebudayaan tertentu secara primordial atau menerima suatu karakteristik kebudayaan tertentu secara primordial atau menerima suatu karakteritik kebudayaan yang baru sebagai sesuatu yang sekedar instrumental.

Kedua, perdebatan antara konstruktivisme dan esensialisme; bahwa yang namanya etnik dan identitas dapat dibentuk dan hasil bentukan etnik baru itu secara esensial menghilangkan atau mengurangi simbol-simbol kultural dari etnik sebelumnya, atau secara esensial pula membentuk karakteristik etnik baru dengan simbol-simbol etnik baru.[15]

Isu inilah yang coba didiskusikan oleh Ernest Gellnar (1983, 1997) dan Anthony D.Smith (1986, 1991) dalam Alo. Keduanya mencoba "duduk" pada posisi "antara", di mana di satu pihak kita tetap mengakui keberadaan etnik-etnik, entah dalam rangka etnik itu sendiri atau dalam rangka sebuah bangsa (artinya ada hubungan antara etnisitas dan nasionalisne), dan dipihak lain kita harus berhadapan dengan bentuk etnik baru karena arus modernisasi. Gellner kemudian mengatakan bahwa : bagaimanapun juga yang namanya "bangsa" adalah sebuah bentukan atau kreasi modern,

[15]I*bid., 53.*

sekurang-kurangnya kreasi pemikiran tentang negara. Kalau begitu, perkembangan negara memang harus dibicarakan tanpa mengabaikan bahwa dalam kenyataannya memang ada negara dan bangsa yang terbentuk karena etnisitas dari etnik. Buktinya, kata Gellner, bangsa memang merupakan bentukan dari kelompok etnik yang sekurang-kurangnya ditunjukan oleh pemimpin (dari etnik mana) yang memerintah.[17] Sebaliknya, Anderson (1983) melihat bahwa bangsa adalah suatu komunitas abstrak atau *imagined community* dari sebuah bangsa, khususnya kelompok etnik. Contoh *imagined community* adalah Filipina dan Indonesia yang merupakan negara multietnik, sehingga kita harus membedakan antara etnik dan bangsa.[16]

Apa yang diuraikan di atas merupakan gejala dari transformasi identitas etnik karena perubahan tertentu dari arah sejarah, keadaan sosial ekonomi, kondisi sosial dan politik. Tindakan dan kelompok etnik merespons kemajuan dan modernisasi sebagai suatu perubahan yang selalu harus dan akan terjadi. Suka atau tidak, kini sedang terjadi transformasi identitas etnik. Konsep kemajuan dan modernisasi telah

[16]Koentjaranigrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 102.

meningkatkan pandangan tentang kebebasan, termasuk kebebasan ekspresi etnik-etnik.

Modernisasi dalam bidang pemerintahan yang demogratis turut membentuk otonomi individual, termasuk otonomi etnik terhadap perubahan struktur dalam masyarakat kita. Kemajuan yang bersifat fundamental tersebut melahirkan masyarakat sipil (*civil society*), yang kini mulai menuntut kembali hak-haknya yang hilang dalam sejarah peradapan etnik-etnik tersebut. Oleh karena itu, definisi sosial terhadap individu kini berubah seiring dengan perubahan struktur kekuasaan, dominasi gender, kekuasaan politik, seperti hak-hak minoritas, termasuk perkembangan agama yang tak membatasi kesukubangsaan sebagai sesuatu yang membatasi peran. Dengan demikian, dalam batas-batas dan konteks tertentu, kita masih membutuhkan pemaknaan etnik secara kontekstual, terutama dalam suasana masyarakat yang multietnik dan multikultur.[17]

[17]Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Pendidikan Multikultur* (Jakarta: Karya Agung, 2005), 65.

B. Politik Identitas dan Fundamentalisme

Gerakan fundamentalisme yang menggunakan politik identitas berbasiskan budaya, agama, etnis, semuanya tidak memiliki toleransi terhadap pluralitas, perdebatan, perbedaan dan ketidaksepakatan. Proyek identitas fundamentalis mengonstruksi identitas secara eksklusif, homogeny dan statis bagi kepentingan politik mereka. Agenda politiknya jelas yaitu memaksakan sumber kekuasaan absolute dengan menekankan identitas tertentu, menutup ruang perdebatan dan ketidaksepakatan.

Konstruksi identitas selalu memarginalkan yang lain, dan yang lain dipahami sebagai lawan. Terdapat dua jenis fundamentalisme terkait dengan politik identitas ini: (1) dominasi mayoritas terhadap minoritas di suatu Negara, (2) dominasi di dalam kelompok minoritas, biasanya mempergunakan *notio otentisitas* etnik dan agama serta membuat batas yang tegas agar dapat mengendalikan komunitasnya secara penuh.

Proyek politik identitas fundamentalis bersifat hegemonic dan eksklusif, secara politis sebenarnya proyek fundamentalisme tidak bertalian langsung dengan tradisi, agama, dan budaya, tetapi proyek ini lebih merupakan proyek

politik yang menggunakan sumber daya modern (hukum, media) dengan menggunakan budaya dan agama dalam mencapai tujuan hegemoniknya. Premis dalam setiap jenis fundamentalisme berbasis politik identitas merupakan pendekatan dan tanggapan yang monolitik dan absolute. Kecenderungan semacam ini akan mengikis demokrasi dalam setiap tingkatan walaupun mereka menggunakan ruang demokrasi untuk mendapatkan dan memperluas kekuasaan politiknya, yang berakibat munculnya diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda.

1. Fundamentalisme sebagai gerakan politik identitas agama

Gerakan fundamentalisme terdapat disemua agama, dalam tulisan ini hanya akan melihat gerakan fundamentalisme dalam agama Islam dan Kristen. Pada awalnya istilah muslim fundamentalis merujuk kepada gerakan Salafiyah Jamaludin Al-Afghani, yang kemudian istilah ini menunjuk kepada gerakan kebangkitan Islam, revivalisme Islam dan gerakan Islam kontemporer, akan tetapi dalam perkembangannya istilah ini pengertiannya menyempit menjadi istilah yang merujuk kepada komunitas muslim yang

beraliran keras, rigid dalam menjalankan agama, ekstrem dan radikal dalam berpikir serta bertindak.[18]

Desain inti pemikiran muslim fundamentalis adalah hakimiyyat Allah, sebuah pengakuan atas otoritas Tuhan dan syari'at Nya semata dimuka bumi, ketertundukkan manusia semata hanya kepada Allah. Hal ini mempunyai implikasi epistemologis kepada penegasian semua yang bukan Allah, bukan dari Allah dan pemberian label musyrik, kafir, fasik dan zalim bagi siapa saja yang tak menegasi selain Allah dan syari'at Nya.[19]

Realitasnya hal ini terbukti dengan sikap muslim fundamentalis yang menyatakan siapapun yang tidak mau menegasikan system selain Allah, atau menolak dan memusuhi kedaulatan system Allah (hakimiyyat Allah) adalah musyrik jahiliyah, dan barang siapa yang tidak mau menerapkan syari'at Islam adalah kafir, fasik dan zalim. Dengan demikian ide ini tentu saja tidak mengakui demokrasi, tidak mengakui kontrak social, tidak mengakui pluralitas. Desain demokrasi, pluralitas

[18] http://islamlib.com/id/

[19] http://islamlib.com/id/

dan kontrak social seluruhnya tidak ada dalam konsep hakimiyyat Allah, yang ada pemikiran teokrasi dan teosentris.[20]

Klaim kebenaran dan kebesaran secara niscaya memunculkan sikap fasis, yang memunculkan cara pandang dikotomis sehingga mendorong mereka untuk memberikan label kepada kelompok yang tidak sepaham dengan label-label buruk. Implikasi praktis dari faham teokratis, dan paradigm teosentris telah memunculkan gejala fasis-dikhotomis, yang kemudian memunculkan tindakan semena-mena dan anarkis.[21]

Kemunculan fundamentalisme tidak hanya disebabkan factor ideologis saja, secara sosiologis dapat dikatakan bahwa tindakan dan pikiran radikal gerakan muslim fundamentalis dapat disimpulkan karena penekanan dan penindasan[22].

Fenomena muslim fundamentalis secara historis juga dapat dilihatkarena adanya keadaan social politik yang tidak stabil. Dengan demikian kemunculan muslim fundamentalis tak hanya timbul oleh factor ideologis saja, akan tetapi factor

[20] http://islamlib.com/id/
[21] http://islamlib.com/id/
[22] http://www.munindo.brd.de/milis

realitas social mempunyai andil besar dalam mengorbitkan muslim fundamentalis.[23]

Secara politis muslim fundamentalis sering disebut dengan Islam politik, yaitu sebuah gerakan sempalan umat Islam yang menggunakan agama sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan suara public dan kekuasaan, seraya berupaya mengganti system yang ada dengan system Islam versi mereka. Seperti partai-partai politik Islam di Indonesia, Ikhwan Muslimin di Mesir, Hizbu Tahrir, dan Wahabi.[24]

Dengan perspektif politis ini, fenomena muslim fundamentalis terlihat profane, baik dalam ide dan tindakannya tidak lagi atas nama Tuhan, agama dan umat, melainkan atas nama komoditas politik, sebab factor yang menimbulkan bukan lagi ideology agama, melainkan respon terhadap realitas social- politik yang dibarengi dengan ambisi kekuasaan.[25]

Kristen fundamentalis, pandangan Kristen fundamentalis dicirikan sebagai sikap memaksakan (bahkan dengan kekerasan) kepercayaannya kepada seluruh umat manusia tanpa menghiraukan apakah orang yang dipaksa itu sudah dan belum beragama. Warta Kitab Suci sering

[23] http://islamlib.com/id/

[24] http://islamlib.com/id/, lihat juga Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta, The Wahid Institute, 2009

[25] http://islamlib.com/id/

diaplikasikan secara hurufiah (dengan menerapkan teks yang mentolerilkan kekerasan) tanpa menghiraukan konteks historis di mana ia ditulis dan lebih tidak lagi aplikasi hermeneutisnya untuk situasi aktual. Pengalaman agama Kristen pada masa silam merupakan sebuah contoh jelas tentang bagaimana agama menjadi 'sumber kekerasan' hal mana terbukti dengan perang salib yang berbenderakan agama.[26]

Pandangan fundamentalisme Kristen terhadap agama lain, di kenal dengan p**aradigma eksklusivisme.** Paradigma eksklusivisme berangkat dari dua ide pokok yang bertolak belakang. Di satu sisi, agama-agama lain lain tak lepas dari keberdosaan manusia yang mendasar dan karena itu tidak memiliki kebenaran. Dilain pihak, hanya Kristuslah yang menyediakan jejak paling absah menuju keselamatan. Paradigma ini dapat dikenali dalam sikap Gereja Roma Katolik (GRK) pra- Konsili Vatikan II yang menempatkan gereja sebagai pusat keselamatan dengan istilah *extra ecclesiam nulla salus* (di luar Gereja tidak ada keselamatan). Akibatnya, GRK bersikap tertutup dan kurang memandang positif agama-agama lain. Paradigma ini dapat ditemui juga di kalangan Protestan, bahwa agama adalah bentuk ketidakpercayaan

[26] Robert Bala, *Peran Orang Kristen Menyikapi Fundamentalisme Agama,* dalam http://www.SVdjawa.org/opini 3

*(ReligionasUnbelief)*dan mustahil dapat mencari dan mengenal Allah. Dengan pendekatan teologis *apriori,* Hanya ada satu agama yang benar yaitu agama Kristen karena Allah menghendakiNya demikian. Sebaliknya betapapun baik dan benarnya agama-agama lain *tampaknya,* namun tetap saja mereka salah dan tak selamat karena terang Allah tidak mengenai mereka. Mereka yakin bahwa semua orang non-Kristen akan binasa (masuk neraka), dan karena itu mereka harus ditolong dengan cara memberitakan Injil kepada mereka.[27]

Fundamentalis Kristen juga mempunyai minat yang besar terhadap politik, dalam beberapa hal mereka menjadi pendukung utama mantan presiden George W. Bush mengenai kebijakan pemerintah Amerika terhadap Islam. Sekelompok Kristen fundamentalis dari Protestan *Evangelical* yang sangat aktif menyebarkan fitnah dan kebencian terhadap umat Islam. Protestan *Evangelical* mempunyai oreintasi politik yang sangat kuat. Salah satu tokohnya, Franklin Graham menyebut Nabi Muhammad sebagai dalang terorisme.[28]

Ciri utama Kristen fundamentalis adalah (1) doktrin *biblical inerracy* (BI) dan (2) *literalist* (tidak hanya sekedar

[27] http: //www.sabdaspace.org/pluralisme_ agama_dan_dialog/
[28] Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama*, hal. 14

literal) *interpretation of Bible* (LIB). BI merupakan ciptaan dari sekelompok evangelical scholars di Amerika Utara (Canada dan US) yang rumusan doktrinnya dideklarasikan dengan *The Chicago Statement on Biblical Inerrancy*.[29] LIB menghasilkan teori-teori akhir jaman, dimana mereka telah menentukan akhir zaman serta kedatangan Yesus kedua kalinya.

Fundamentalisme pada mulanya adalah bagian kecil dari komunitas umat Kristen. Gerakan ini adalah gerakan radikal dan militan yang menjaring para penganut Kristen Protestan dan berkembang di Amerika Serikat di akhir abad19. Inti gerakan ini adalah mengembalikan ajaran Kristen kepada asal-muasalnya atau dapat disebut juga sebagai suatu gerakan reaksioner dalam rangka menentang modernisasi dan sekulerisasi di AS. Sama halnya dengan Islam, fundamentalisme dalam Kristen tidaklah mewakili umat Kristen secara keseluruhan. Mereka cuma akan menjadi kelompok kecil yang selamanya dikucilkan oleh masyarakat banyak karena eksklusivisme yang ditonjolkan mereka, yang menampakkan sikap yang selalu anti sosial dan sangat arogan di mata masyarakat.[30]

[29] http://www.akufaraya.com/
[30] http://www.munindo.brd.de/milis

Fundamentalisme Kristen melahirkan Gerakan Patriotik Kristen yang pernah memunculkan seorang Timothy McVeigh yang menjadi dalang aksi pemboman gedung federal di Oklahoma. Gerakan rasis dan sektarian dari kelompok Ku Klux Klan adalah merupakan produk dari fundamentalisme Kristen yang secara jelas telah menyelewengkan ajaran Kristen dan menebarkan teror rasisme terhadap kelompok ras kulit hitam di AS. Fundamentalisme Katolik melahirkan kelompok IRA sebagai kelompok separatis di Irlandia yang sering menebarkan teror pemboman terhadap gedung-gedung sipil dan pemerintah, fundamentalisme Katholik juga melahirkan kelompok front pembebasan Basque di Spanyol yang melegalkan pemboman dan pembunuhan.[31]

Sebagai bagian dari fenomen global, di Indonesia, politik identitas berdasarkan agama terasa semakin terang benderang terutama sejak kejatuhan rejim Soeharto pada bulan Mei 1998. Setidaknya, bangkitnya kembali *politics of identity* ini terlihat dari munculnya dua gejala politik utama, **pertama**, terjadinya kerusuhan antar etnis di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, Maluku, Papua dan Kupang.[32] **Kedua**,

[31] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 18.

[32] Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta, The Wahid Institute, 2009, hal. 79

terjadinya tindak kekerasan dengan menggunakan sentimen-sentimen agama, seperti yang terjadi pada peristiwa Mataram, Kupang, serta Maluku. Ada beberapa bentuk kekerasan politik agama yang terjadi di Indonesia. Pertama, kekerasan fisik seperti pengruskan, penutupan tempat ibadah, seperti gereja dan Mesjid maupun tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan obyek kekerasan tersebut menjadi terluka, trauma maupun terbunuh. Bentuk kekerasan yang kedua adalah kekerasan simbolik.

Kekerasan simbolik ini dapat berupa kekerasan semiotik seperti berbentuk tulisan-tulisan yang bernada melecehkan sesuatu agama. Pelaku tindakan kekerasan politik agama secara potensial bisa berasal dari setiap kelompok agama di Indonesia. Namun, belajar dari kasus-kasus yang muncul di Maluku, Poso, Mataram serta Kupang maka bisa ditemukan sebuah kecenderungan bahwasanya sebagian besar kekerasan politik agama yang timbul akibat konflik yang terjadi antara komunitas Islam dan komunitas Kristen. Di Maluku, misalnya, komunitas Islam dan Kristen teridentifikasi melalui ikat kepala dan identitas nama kelompok yang bertikai anatara kelompok merah (obet) dan kelompok putih (acang). [33]

[33]*Ibid*., 26.

Dari data statistik, kabupaten/kota yang menjadi ajang pengrusakan Mesjid dan gereja, dapat dilihat bahwa pengrusakan gereja terjadi di Kabupaten/ Kota yang prosentase penganut agama Islamnya mayoritas, sedangkan laju pertumbuhan umat Kristennya melebihi laju pertumbuhan umat Islam di daerah tersebut.

Perspektif historis terlihat bahwa kekerasan politik agama merupakan fenomena khas Orde Baru. Ini terlihat dari data yang memperlihatkan bahwa pada masa Orde Lama hampir tidak ada kerusuhan yang berlatar belakang agama seperti pengruskan masjid dan gereja. Pada kurun waktu 1945-1966, hanya terdapat dua gereja dan beberapa Masjid yang dirusak, itupun terjadi di daerah-daerah yang mengalami gejolak politik dan keamanan bertalian dengan gerakan sparatis seperti RMS dan RPM.[34]

Semua label fundamentalisme agama, apakah itu Kristen, Yahudi, Islam, Hindu atau Buddha, senantiasa bertendensi untuk membentuk sebuah sistem berpikir tertutup yang dengan demikian secara sintetis mengisolasikan perbedaan pendapat, keraguan, alternatif, dan keterbukaan. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk memberikan

[34]Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, 32.

keamanan, keyakinan orientasi, identitas yang mantap dan kebenaran yang menyeluruh. Mereka akan tiba pada sebuah kepastian sistem kepercayaan yang dihasilkan sendiri dan disterilkan terhadap keraguan. Fundamentalisme modern memberikan pelayanan dalam bentuk militannya sebagai legitimasi tuntutan intelektual, agama dan supremasi terhadap mereka yang berbeda pendapat. Sistem iman yang tertutup dan penerapan peraturan dalam format fundamentalisme mewakili suatu paham *kembali secara absolut* dalam politik sampai pada batas bahwa mereka berasumsi memiliki peran dalam lingkungan publik dan mematikan kritik, semua alternatif, keraguan, serta dialog terbuka mengenai tuntutan kognitif di antara mereka yang setara.

Apa yang terjadi selanjutnya adalah pengabaian penuh (atau kadang-kadang dalam masyarakat demokratis yang telah berkembang hanya secara selektif) terhadap hak azasi manusia, pluralisme, toleransi, hukum dan prinsip mayoritas demokrasi atas nama kebenaran yang absolut yang dipercayai oleh kaum fundamentalis. ”Dalam budaya barat akhir-akhir ini kita telah menjadi saksi beraneka ragam gerakan fundamentalisme: Fundemantalisme Protestan di Amerika Serikat,

fundamentalisme etnis di Balkan atau Jerman, dan Marxisme-Leninisme dalam berbagai bentuknya.[35]

2. Gerakan transnasional dan fundamentalisme

Gerakan transnasional merupakan gerakan-gerakan kelompok fundamentalis yang ingin melebarkan sayap pengaruhnya ke seluruh dunia, dalam agama Islam di kenal tiga gerakan transnasional: (1) Ikhwanul Muslimin, (2) Hizbut Tahrir, (3) Wahabi (Wahabisasi global).

Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Bana, yang bertujuan untuk melawan penjajahan, mengatasi kemunduran peradaban Islam, serta mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang murni. Akan tetapi al-Bana dan para pengikutnya lebih meyakini bahwa ideology dan system gerakan fasisme Itali-Mussolini dan komunisme-Soviet lebih berguna dalam mencapai tujuannya daripada liberalism.[36]

Dari fasisme-Mussolini Itali, Ikhwanul Muslimin mengadopsi totalitarianism dan negara sentralistik, akan tetapi menolak faham nasionalisme. Dari komunisme-Soviet, Ikhwanul Muslimin mengadopsi totalitarianism, system

[35]Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 78.
[36] Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta, The Wahid Institute, 2009, hal. 80.

penyusupan dan perekrutan anggota (*cell system*), strategi gerakan, internasionalisme, akan tetapi menolak ateisme. Dari fakta ini Ikhwanul Muslimin dan kelompok garis keras yang lain disebut dengan Islamofasisme, yaitu sebuah gerakan politik yang bertujuan mewujudkan kekuasaan mutlak berdasarkan pemahaman mereka atas Al-Qur'an.[37]

Sayyid Qutb sebagai pengganti Hasan al-Bana, mengingatkan pengikut ideologinya harus memperjuangkan kekuasaan proletariat, supremasi ummah/syari'ah, dan terwujudnya Negara Islam dan pada akhirnya terwujud khilafah yang sentralistik. Gagasan-gagasan ini ditangkap para pengikutnya dikalangan garis keras untuk melakukan aksi-aksi kekerasan baik di Mesir ataupun seluruh dunia untuk mencapai kekuasaan.[38]

Hizbut Tahrir, muncul karena kekecewaan Taqiyudin al-Nabhani terhadap Ikhwanul Muslimin yang terlalu moderat dan akomodatif terhadap Barat, kemudian dia mendirikan Hizbut Tahrir tahun 1952 di Jerusalem Timur. Dia berambisi untuk mendirikan Khilafah Islamiyah internasional yang diawali dari teritori Arab dan kemudian

[37] Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan*, hal. 82
[38] Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan*, hal. 85

teritori Islam non Arab, pada saat ini pusat gerakan internasional Hizbut Tahrir berada di Inggris.[39]

Perjuangan Hizbut Tahrir dipenuhi gagasan-gagasan pemurnian Islam, dan melakukan penolakan sepenuhnya terhadap konsep-konsep Barat, tetapi realitas menunjukkan bahwa pemikiran politik Taqiuddin al-Nabhani jelas dipengaruhi oleh Hegel, Rousseau dan tokoh-tokoh Eropa yang lain. Akan tetapi Taqiuddin al-Nabhani mengganti term-term yang berasal dari Barat diubah dengan term-term berbahasa Arab sehingga Islam.[40]

Terdapat tiga tahap perjuangan Hizbut Tahrir dalam usaha mendirikan khilafah internasional: (1) membangun partai (hizb), tahap ini bisa dikatakan sebagi proses cuci otak dan pembentukan pribadi Islami (paradigm Hizbut Tahrir) yang biasanya dilakukan dalam halaqah-halaqah. (2) berinteraksi dengan masyarakat, tahap ini adalah tahap pembentukan sel-sel baru, (3) merebut kekuasaan. Tahap ini merupakan tahap pamungkas yang akan dilakukan setelah mereka yakin akan menang dan berhasil merebut kekuasaan.[41]

---

[39] Ed Husain, *The Islamist*, London: Penguin Books, 2007, hal. 161-164.

[40] Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan*, hal. 87.

[41] Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan*, hal. 89

Ketiga gerakan transnasional ini telah memunculkan beberapa kekerasan; (1) kekerasan doctrinal, pemahaman literal tertutup atas teks-teks keagamaan dan hanya menerima kebenaran secara sepihak. (2) kekerasan tradisi dan budaya, klaim kebenaran sepihak membuat mereka tidak mampu untuk melihat kebenaran lain yang berbeda. (3) kekerasan sosiologis, dampak lanjutan dari dua kekerasan pertama, yang berupa aksi-aksi anarkis dan destruktif terhadap pihak lain yang dianggap musyrik, murtad atau kafir.[42]Gerakan transnasional dalam bidang olah raga khususnya sepakbola, hadir dengan fundamentalis *Ultras Hooligans*, kelompok supporter yang penuh inspirasi dan ekstrim, mereka mengidentifikasi diri sebagi kelompok supporter yang fanatic dan militant. Bagi kelompok ini Ultras dimaknai sebagai identifikasi diri secara sungguh-sungguh segenap hasrat yang teramat dalam sisi emosionalnya kepada klub.3*Ultras Hooligans*, muncul di Italia dari demonstrasi-demonstrasi anak-anak muda Italia karena terjadinya ketidakpastian politik pada akhir tahun 1960- an. Pada perkembangannya *Ultras* merupakan simpati politik dan representasi ideology. Setiap *Ultras* mempunyai basis ideologis dan aliran politik yang sama, *Ultras* memiliki andil dalam melestarikan faham-faham tua

[42] www. Bangunsuporter.blogspot.com.2007

seperti fasisme, komunisme dan sosialisme.[3]*Ultras hooligans* merupakan kelompok supporter yang terorganisir (*highly organized*) selain fundamentalis mereka mempunyai kreatifitas tinggi dan gaya dukung teatrikal terhadap klub. Mereka mampu membuat pertunjukan yang spektakuler di dalam stadion, seperti munculnya aneka kostum, bendera, spanduk, bom asap, kembang api dan sebagainya. Kelompok *Ultras Hooligans* selalu menempatkan diri pada posisi tetap di dalam stadion yaitu dibelakang gawang sebelah utara dikenal dengan istilah Baron dan di selatan dikenal dengan Curva.[39] Namun diakhir pertandingan biasanya mereka tetap melakukan ritual tawuran antar supporter.

Kelompok *Ultras hooligans* juga berorientasi internasionalisme dalam rangka mengembangkan dan melestarikan basis ideology dan aliran politik yang dianut, kelompok-kelompok *Ultras* baru di Eropa, misalnya *Ultras* Perancis, Roligans Denmark, Oranye Holland, Tartar Army Skotlandia sedangkan di Amerika Latin muncul Barras Bravas Argentina. Untuk kelompok supporter bola di Indonesia yang mengadopsi gaya Ultras adalah Slemania supporter PSS Sleman dan Brojomusti supporter PSIM Yogyakarta.

C. Politik Identitas dan Ulama

Literaterasi ilmu politik mengupas beberapa pendapat, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (*political identity*) dengan (*political of identity)*.[43] *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik. Sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik.

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam kontestasi kekuasaan politik seperti Pemilihan Presiden sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktik politik kekinian. Karena itu, para ilmuan yang bergelut dalam wacana politik identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sederhana dan lebh operasional. Misalnya saja Agnes Heller mendefinisikan politik politik identitas sebagai politik yang memfokuskan kepada pembedaan sebagai kategori utamanya yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebesan bermain (*free play*), walaupun memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan, dan pertentangan.

[43]Muhtar Habuddin, "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, dalam Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 3, No. 1 Februari 2012.

Kata ulama merupakan bentuk jamak dari kata alim, yang berarti ”yang tahu” atau ”yang mempunyai pengetahuan”. Di dalam Alquran, kata ulama disebutkan dalam 2 tempat. Pertama dalam QS Fathir ayat 28.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ مُخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَۗ إِنَّمَا
يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٞ ٢٨

28. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama[1258]. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat Ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah) Jika ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya (ayat 27),

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ ثَمَرَٰتٖ
مُّخۡتَلِفًا أَلۡوَٰنُهَاۚ وَمِنَ ٱلۡجِبَالِ جُدَدُۢ بِيضٞ وَحُمۡرٞ مُّخۡتَلِفٌ
أَلۡوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٞ ٢٧

27. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.

Pengertian ulama pada ayat ini adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kealamaan atau ilmu kauniyah. Kedua, ulama dalam pengertian orang yang memiliki pengetahuan agama, seperti dalam QS asy-Syu'ara, ayat 196-197.

وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٩٧﴾

196. Dan Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang yang dahulu.

197. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kealamaan dan ilmu agama, dan pengetahuan yang dimilikinya itu dipergunakan untuk mengantarkannya kepada rasa Khasy'yah (takut atau tunduk) kepada Allah swt.

Di Indonesia, istilah ulama atau alim ulama yang semula dimaksudkan sebagai bentuk jamak, berubah penegrtiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama juga menjadi lebih sempit, karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama yang Islam. Sedangkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan kealaman atau umum disebut dengan cendekiawan atau ilmuan.

Menurut Ali Mustafa Yaqub, ada 5 kriteria ulama ahli waris Nabi itu adalah (1) menguasai ilmu agama Islam; (2) hanya takul kepada Allah swt; (3) zuhud dan orientasi ukhrawi; (4) akrab dengan rakyat; (5) berusia minimal 40 tahun.[44]

Lebih dari itu, istilah *ulama* sendiri merujuk kepada seseorang yang mumpuni dalam bidang ilmu agama, berakhlak baik, menjadi teladan hidup bagi masyarakat, dan sifat-sifat mulia lainnya. Ulama senantiasa mengisi sendi-sendi kehidupan dengan laku positif yang berdampak kebaikan secara luas. Keberadaan ulama mendatangkan rahmat, bukan laknat. Dakwahnya juga merangkul, bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Habib Luthfi dalam buku yang sama menyebutkan hadits Riwayat Ad-Dailami dari Anas r.a, Rasulullah SAW bersabda: *ittabi'ul ulama'a fainnahum suruuhud dunyaa*

[44]Mustafa Ali Yaqub, "Kriteria Ulama Ahli Waris Nabi", dalam *Islam Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, h. 117-122.

wamashaa biihul akhirah. "Ikutilah para ulama karena sesungguhnya mereka adalah pelita-pelita dunia dan lampu-lampu akhirat." (HR Ad-Dailami)

Hadits di atas tentu saja semakin memperkuat pengakuan Rasulullah terhadap para ulamanya. Namun, saat ini sebagian masyarakat tidak sedikit yang terjebak dengan simbol-simbol agama yang melekat melalui pakaian seseorang. Akibatnya, meskipun seorang itu tidak berilmu, bahkan secara perilaku dan ucapan tidak mencerminkan akhlak mulia, tetapi kerap diikuti sebagai seorang yang dianggap mengerti agama. Na'udzubillah. Konsep ulama menurut Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya *Tafsir Al-Misbah* adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang jelas terhadap agama, Al-Qur'an, ilmu fenomena alam. Pengetahuan tersebut mengantarkan seseorang memiliki rasa *khasyyah* (takut) kepada Allah. Ulama juga mempunyai kedudukan sebagai pewaris Nabi yang mampu mengemban tugas-tugasnya serta memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Namun, relevansi dalam kehidupan sekarang terutama di Indonesia yang lebih sering mengaitkan atau membatasi pengertian ulama hanya kepada para kiai, ustadz dan pendakwah adalah berbeda dengan pemahaman Quraish Shihab, karena pembatasan itu terkadang mengantarkan pada kekeliruan dan kesalahan dalam menilai seseorang. Kecuali

gelar tersebut memang disematkan kepada seseorang yang memang secara ilmu agama mumpuni dan mempunyai akhlak yang baik terhadap kehidupan bersama. Oleh karena itu, konsep ulama menurut Quraish Shihab adalah mengacu pada sifat-sifat, bukan hanya sekadar pada gelar atau atribut lahiriah. Cara pandang tersebut akan lebih sesuai dalam semangat agama, bahwa kemuliaan bukan dikarenakan gelar atau jabatan tertentu, melainkan dengan ketakwaan dan kecintaan manusia kepada Allah dilengkapi dengan ilmu agama yang mumpuni yang dengan ilmu itu mempunyai dampak positif terhadap kehidupan manusia secara umum. Ini menunjukkan bahwa ulama juga termasuk kaum intelektual yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya. Badaruddin Hsukby dalam bukunya *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman* (1995) mengungkapkan definisi ulama menurut para Mufassir Salaf, di antarannya, *pertama*, menurut Imam Mujahid berpendapat bahwa ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah SWT. Malik bin Anas pun menegaskan bahwa orang yang tidak takut kepada Allah bukanlah ulama. *Kedua,* pendapat Hasan Basri bahwa ulama ialah orang yang takut kepada Allah dikarenakan perkara ghaib, suka terhadap sesuatu yang disukai Allah, dan menolak segala sesuatu yang dimurkai Allah. *Ketiga,* pendapat Ali Ash-Shabuni bahwa ulama adalah orang yang rasa

takutnya kepada sangat mendalam dikarenakan ma'rifatnya. *Keempat,* menurut Ibnu Katsir yang menyebutkan ulama adalah yang benar-benar ma'rifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepadanya. Jika ma'rifatnya sudah mendalam, maka sempurnalah takut kepada Allah. *Kelima,* Syekh Nawawi Al-Bantani yang berpendapat bahwa ulama adalah orang-orang yang menguasai hukum syara' untuk menetapkan sah itikad maupun amal syari'at lainnya. Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili berkata bahwa secara naluri ulama ialah orang-orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk mengubah hidup dunia dan akhirat serta takut ancaman Allah jika terjerumus ke dalam kenistaan. Orang-orang maksiat hakikatnya bukan ulama. Kelima definisi dari para Mufasir Salaf tersebut, bisa ditarik benang merah yakni ulama ialah orang yang takut kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam QS Al-Fathir ayat 28: *innama yakhsyallaha min ibadihil ulama* (sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para Ulama). Terkait kata *ulama* dalam Nahdlatul Ulama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengatakan bahwa nama Nahdlatul ulama diilhami oleh kalimat Ibnu Athaillah as-Sakandari (W 1309 M) penulis kitab Al-Hikam. Menurut Gus Dur, Mbah Hasyim Asy'ari (Pendiri NU) kerap mengutip Ibnu Athaillah yang mengatakan,

Latashhab man la yunhidluka ilallahi haaluhu wa laa yadulluka ilallahi maqooluhu (jangan kau jadikan sahabat atau guru orang yang amalnya tidak membangkitkan kamu kepada Allah). Membangkitkan itu makna dari *yunhidlu*. Menurut Gus Dur, ulama-lah yang tingkahnya membangkitkan kepada Allah. Maka lahirlah Nahdlatul Ulama. Kata *nahdlah* jelas dari *yunhidlu* tadi. Kala itu usulan kata Ulama dari banyak kiai. Tapi Gus Dur mengungkapkan, yang merangkum menjadi kata-kata Nahdlatul Ulama ialah Mbah Hasyim Asy'ari.

BAB III
KAJIAN KEWILAYAHAN

Lokasi penelitian ini berada di 3 Kabupaten yaitu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotamadya palangkaraya dan Kabupaten Barito Utara, sebagaimana data awal bahwa di tiga Kabupaten ini yang dijadikan subjek Penelitian.

1. Kabupaten Barito Utara

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu Kabupaten di Pronvinsi Kalimantan Tengah, Ibu kotanya Muara Teweh.. Kabupaten ini berdiri pada tanggal 29 Juni 1959. Semboyan kabupaten ini adalah *"Iya Mulik Bengkang Turan"*. Posisi Kabupaten Barito Utara pada 114° 27' 00" – 115° 49' 00" Bujur Timur dan 0° 58' 30" Lintang Utara – 1° 26' 00" Lintang Selatan. Wilayah Barito Utara meliputi pedalaman daerah aliran Sungai Barito yang terletak pada ketinggian sekitar 200-1.730 m dari permukaan laut. Bagian selatan merupakan dataran rendah dan bagian utara merupakan dataran tinggi dan pegunungan. Potensi terbesar kawasan ini ada pada sektor kehutanan, pertambangan (batubara dan emas), sedangkan untuk sektor perkebunan adalah kelapa sawit dan karet. Sektor kehutanan dan perkebunan karet sudah cukup lama turut menyumbang pemasukan bagi negara sedangkan sektor pertambangan seperti tambang emas juga memberi andil yang cukup besar. Tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit saat ini sudah mulai berproduksi yang nantinya diharapkan dapat memberikan pemasukan yang cukup besar bagi negara dan daerah. Jumlah Penduduk saat ini adalah 181.901 jiwa tersebar di 9 kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Barito Utara adalah:

1. Gunung Purei
2. Gunung Timang
3. Lahei
4. Montalat
5. Teweh Tengah
6. Teweh Timur
7. Teweh Selatan
8. Teweh Baru
9. Lahei Barat

Adapun daftar pemilih tetap di kabupaten Barito Utara sebesar 95.521, pemilih laki-laki sebanyak 49.487, perempuan sebanyak 46.034. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama dan suku sebagai berikut: Islam; 97.916, Protestan; 13.829, Katolik; 7.535, Hindu: 34.177.[45] Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan suku atau etnis suku dayak Bakumpai sebesar 44,67%. [46]

[45]Kementerian Agama Kab. Barut, "Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara; jumlah umat beragama" (Kemenag Barut, 2018).
[46]Tengah, "Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku dan Agama."

Tabel 1. Organisasi Keagamaan di Kabupaten Barito Utara

No	Nama Organisasi	Ketua Umum	Sekr.Umum
1	MUI Kab Barito Utara	H.A.Gazali,S.PdI	
2	NU	H. Al.Hadi	
3	Muhammadiyah	Rahmat Muratni	
3	LDII	Selamet	

*Data yang diolah

2. Kabupaten Kotawaringin Timur

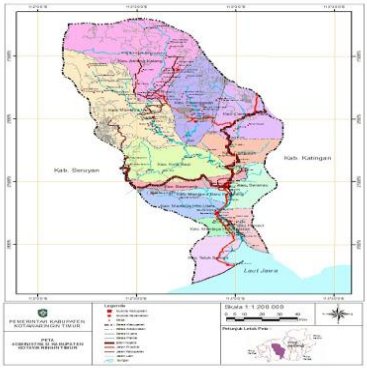

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah 16.496 Km² dan berpenduduk pada tahun 2019 lalu adalah 436 276 dan mayoritas muslim 76%. Sampit ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kota perdagangan yang memiliki pelabuhan Laut dan memiliki omzet yang memberikan konstribusi ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Kotawaringin Timur rata-rata diatas 5% / tahunnya. Sehingga berjalannya ekonomi micro (sector riil) terkonstribusi dengan baik sampai ke masyarakat tingkat bawah.

Kehidupan beragama di kabupaten Kotawaringin Timur sangat baik, dinamis dan kondusif. Seluruh komponen masyarakat beeragama bisa memahami dan memberikan ruang yang nyaman bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah keagamaannya.

Majelis Ulama Indonesia kabupaten Kotawaringin Timur sebagai wadah jamiah organisasi keagamaan Umat dengan data sebagai berikut

Tabel 1. Organisasi Keagamaan di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Nama Organisasi	Ketua Umum	Sekr.Umum
1	MUI Kab Barito Utara	KH.Amrullah Hadi	
2	NU	KH.Samsudin,S.PdI	
3	Muhammadiyah	M.Mudhofar	
3	LDII	Surjono	

3. Kota palangka Raya

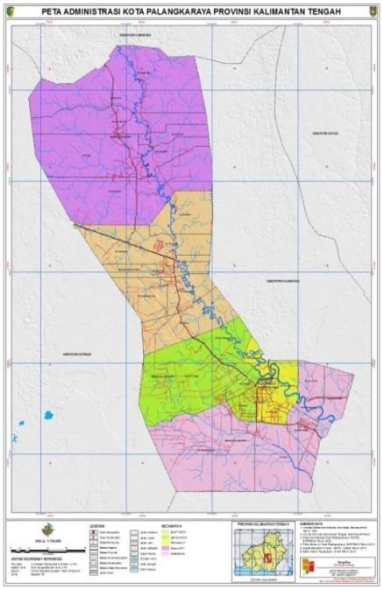

Kota Palangka Raya adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini memiliki luas wilayah 2.400 km² dan berpenduduk sebanyak 376.647 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 92.067 jiwa tiap km² (Sensus 2015). Sebelum otonomi daerah pada tahun 2001, Kota Palangka Raya hanya memiliki 2 kecamatan, yaitu: Pahandut dan Bukit Batu. Kini secara administratif, Kota Palangka Raya terdiri atas 5 kecamatan, yakni: Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sabangau, dan Rakumpit. Kota ini dibangun

pada tahun 1957 (UU Darurat No. 10/1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah) dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam serta Hutan Lindung Tangkiling. Pada saat kota ini mulai dibangun, Presiden Soekarno merencanakan Palangkaraya sebagai ibukota negara di masa depan, menggantikan Jakarta.[2][3] Palangka Raya merupakan kota dengan wilayah terluas di Indonesia atau setara 3,6 kali luas Jakarta.

Tabel 1. Organisasi Keagamaan di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Nama Organisasi	Ketua Umum	Sekr.Umum
1	MUI Kab Barito Utara	KH.Amrullah Hadi	
2	NU	KH.Samsudin,S.PdI	
3	Muhammadiyah	M.Mudhofar	

BAB IV
POLITIK IDENTITAS
DI MATA ULAMA

A. Pandangan Ulama Kalimantan Tengah terhadap Politik Identitas pada kontestasi Pemilihan Presiden tahun 2019

Pandangan Ulama Kalimantan Tengah terhadap Politik Identitas sangat beragam dan variatif, beberapa pandangan mengatakan bahwa Politik identitas itu sebuah keniscayaan yang mesti dilakukan oleh pelaku politik Praktis. Beberapa ulama yang setuju dengan Politik Identitas dapat dilihat dari beberapa pernyataan dari hasil wawancara sebagaimana dibawah ini

Ustadz U, Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahman Desa Lahei Kec.Lahei Kab.Barito Utara, Tokoh Masyarakat Lahei ini menyatakan bahwa jika Ulama berpolitik Praktik langsung atau tidak langsung pasti akan mengajak kelompok

pengajiannya, atau meminta dukungan umat di sekitar kediamannya.

(Wawancara dengan Pimpinan Pondok pesantren Arrahman)

"amun ulama umpat partai politik, nyata banar maminta dukungan ka kalompoknya, walaupun sidin kada bapadah tarang-tarangan, lawan pasti ewen te balaku duhup mun jida mancoblos paling jida maanter akan alat pemilu , dan jite pasti jadi termasuk politik identitas, narai hindai balua ucapan ayu hadukung sama arep, ji pasti sasama Islam"[47]

(jika ulama ikut partai politik, secara nyata pasti minta dukungan ke kelompoknya,meskipun ulama itu tidak terang-terangan meminta dukungan, yang jelas jika sudah masuk partai pasti minta dukungan jika tidak mencoblos setidaknya mengantarkan alat peraga kampanye sidin dan itu sudah masuk dalam Politik Identitas, apalagi keluar ucapan hayo dukung sesama kita dan yang pasti sesame umat islam)(Terjemahan bebas penulis)

[47] Wawancara kepada Ust.KH. Syafii dan Ust.Salamat Pimp.Pesantren Ar-Rahman, Sabtu, 13 April 2019

(Foto wawancara dengan Ustadz KH.S)

Menurut Ustadz H Politik Identitas itu pasti ada, meskipun secara terselubung, baik antar keluarga, agama dan suku. Ditanya bagaimana jika ulama berpolitik apakah akan nada Politik Identitas, secara spontan beliau menjawab “iya, dan sangat mungkin, misalnya ada ulama ikut partai si anu dan diiming-iming jabatan tertentu, jika ulamanya nafsu untuk berkuasa maka ia pasti mau dan akan melupakan posisi umatnya, namun ulama itu juga pasti memiliki alasan, katanya jadi pejabat itupun salah satu jihad untuk memperjuangkan umat “ jika masih ingat”, namun kebanyakan ya maklumi ajalah karena manusia itu diberi Allah sifat pelupa.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Pak S, Ketua LDII Barito Utara.

"Secara nyata Politik Identitas tidak nampak dipermukaan, saya berani memastikan secara terselubung hal itu pasti dilakukan oleh Politisi, dan menurut saya jika Politisi Islam, Kristen atau Suku mana saja, pada saat menyampaikan visi misinya melalui sosialisasi di Kelompok Keluarga, Kelompok Agamanya sendiri atau sukunya menurut saya itu sah-sah saja, namun jika ajakan itu disampaikan di halayak heterogen pasti akan menuai celaan dan hujatan, itu artinya bahwa masyarakat sebenarnya tidak terlalu suka dengan Politik Identitas, meskipun pada dasarnya Politik Identitas itu diperlukan oleh Politisi untuk mendapat dukungan masyarakat.[48]

Tentang ulama berpolitik, dengan diplomasi beliau mengatakan " ulama jadi pejabat itu juga amanah umat, banyak tempat melaksanakan jihad, tidak saja memberikan ta'lim namun juga bisa menjadi penentu kebijakan

KH. R Pimpinan Pondok Pesantren di Muara Teweh mengakatan,

[48] Wawancara kepada M. Arifin, M.Pd Selasa, 16 April 2019

"Politik Identitas itu tidak akan bisa hilang dalam kancah politik, bohong saja jika ada orang yang menagatakan tidak menggunakan issu Politik identitas, minimal dia di kerabatnya atau sukunya. Apalagi ulama sudah jelas menggunakan pendekatan Identitas dalam menggali dan mencari suara, dan menurut saya sah-sah saja, dan hukumnya ***halal*** dan ***mubah*** boleh sesuai dengan firman Allah dalam surat As.Shaf ayat 4 [49]

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan Surat Al.Maidah ayat 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا

[49] Wawancara KH.R Pimp.Pondok Pesantren Y di Muara Teweh

يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Menurut Ustadz R, bahwa Politik identitas itu dalam rangka tolong menolong sesama umat Islam untuk mencapai sesuatu tujuan " jadi kita harus menolong Saudara Kita yang berjuang dengan jalan berpolitik demi umat Islam, karena setidaknya dia akan berjuang untuk dirinya, keluarganya dan umat se agamanya" jadi politik identitas itu menurut saya masih sangat diperlukan untuk berpolitik"

Ustadz AG yang juga Ketua Umum MUI dan Ketua Umum NU mengatakan,

"Politik Identitas masih perlu dipakai oleh Politisi, dan Politik identitas sangat dipakai oleh tokoh agamawan yang masuk dalam kancah Politik dan salah satu Ormas Islam tentunya akan mendukung penuh calon orang dari ormas itu, rasanya tidak mungkin orang ormas tertentu akan mendukung yang bukan dari ormas tertentu, jika itu ada wallahu alam saya tidak bisa berkomentar.Namun pada tataran masyarakat bawah sepertinmya masih memiliki pilihan sendiri, dan mereka dibebaskan oleh ormas Islam tertentu dipersilahkan memilih sesuai hati nuraninya. Dan pimpinan ormas pada dasarnya

hanya himbauan, seperti seharusnya orang ormas juga harus memilih politisi kader ormas itu.[50]"

Agak berbeda pendapat dengan pendapat TA, yang mengatakan "agar demokrasi berjalan baik, seyogianya Politik Identitas tidak mesti harus ada, karena merusak tatanan demokrasi. Semua orang berhak untuk mendapat dukungan, dari siapa dan dari kelompok manapun.

Pimpinan Muhammadiyah Kab Barito Utara mengatakan, "Politik Identitas itu pada kondisi negeri ini masih belum bisa dikikis. Politisi kita masih memerlukan jalur ini untuk mencari dukungan. Dan dukungan itu meskipun

[50] Wawancara kepada KH.Ahmad Gazali,S.PdI Ketua MUI, Kabupaten Barito Utara dan dengan Unsur Ketua dan Sekr.Umum PC NU Kotim Minggu, 14 April 2019

secara nyata beliau meminta pengikut-pengikut beliau otomatis mendukung beliau (maksudnya Ulama).

Ditanya bagaimana sikap warga Muhammadiyah dalam Pilpres, Ketum PDM Barito Utara ini menjelaskan,

"Warga Muhammadiyah Kab.Barito Utara sesuai arahan Pimpinan Pusat kita bersikap netral aktiv. Artinya kita netral dalam memilih, namun aktiv ikut mesosialisasikan tahapan-tahapan Pemilu bersama KPUD Kab.Barito Utara. Dan berupaya agar Pileg dan Pilpres ini berjalan sukses, damai dan tetrpilihnya pimpinan yang berkualitas dari hasil yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Pada setiap kesempatan jika saya khutbah jumat, atau mengisi kegiatan apapun baik yang dilakukan oleh PDM maupun Ortom Muhammadiyah seperti Aisyiah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyaiatul Aisyaih dll, saya anjurkan agar berupaya menciptakan kesejukan dalam masyarakat, dan terbukti Kab.Barito Utara Alhamdulillah kondusif.[51]"

[51] Wawancara dengan Ketua PDM, Kab.Barut Minggu, 14 April 2019

Pendapat KH AH dari Sampit mengatakan bahwa Politik Identitas untuk saat ini belum bisa dihapus, karena sepertinya Politik Identitas merupakan senjata Politikus untuk menarik simpati Pemilih baik secara structural (dalam organisasi kemasyarakatan (agama, suku atau paguyuban). Dan menurut saya secara sadar atau tidak politikus menggunakan Politik Identitas dalam menggalang massa dukungannya.

"Nyata *banar*, Politik Identitas yang mengandalkan Identitas sebagai alat untuk menggalang massa dan dukungan, dan itu dipakai *kada* saja yang politisi biasa namun tokoh-tokoh yang masuk dalam partai seperti Pendeta, Ulama, nah pola Identitas *pang* yang mereka pakai, dan saat ini *pina* masih

payu haja am sabab kalompoknya pasti mandukung lawan mamilih sidin" [52]

Pendapat yang agak moderat adalah dari Ustadz M, yang mengatakan "Politik Identitas bisa saja dilakukan pada ranah tertentu, namun Politik Identitas dapat celaan pada kelompok yang lain, jadi tergantung Politikusnya. Dan menurut saya Politik Identitas tidak saja digunakan pada Pesta Politik namun juga pada birokrasi" Lebih jauh beliau menjelaskan, "dimana KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme) adalah bagian dari Politik Identitas, lihat saja beberapa politisi atau pejabat yang terlibat kasus apa saja jika dia dalam lingkaran kekuasaan maka anda tahu sendiri bagaimana si penegak keadilan memproses."

Menurut Ustadz M, "Negara yang dibangun dari hasil politik Identitas adalah Negara yang tidak memiliki wibawa Politik yang baik "menurut saya negara yang baik adalah Negara yang memiliki wibawa Politik (Politikusnya jujur dan dapat dukungan elektibilitas yang penuh bukan dari Politik identitas), Penyelenggara Pemerintahan yang juga berwibawa dan adil sebagai pemegang amanah rakyat banyak".[53]

[52] Wawancara dengan KH. AH Kotim
[53] Wawancara dengan Ustadz S, Kotim

Ustadz S, Pimpinan Pondok Pesantren Salafi di Sampit menyebutkan, ”Pada dasarnya Politik identitas itu adalah menampilkan identitas baik perorangan, kelompok, agama, suku dan daerah, menurut saya Politisi yang menggunakan pendekatan ini sah-sah saja dan bahkan menurut saya sebuah keharusan, agar kelompok itu bisa mencapai tujuannya untuk mewakili kelompoknya baik diperintahan maupun di Dewan Perwakilan rakyat, dan yang bersangkutan adalah kepanjangan tangan dari kelompoknya untuk menyampaikan aspirasi kelompoknya, daerahnya, sukunya, agamanya dalam pembangunan, jadi apa jeleknya Politik Identitas”[54]

Ustadz M mengatakan bahwa Politi Identitas harus dilakukan karena Allah sudah memberikan petunjuk dalam Al.Quran “Politik Identitas adalah sebuah keharusan, bahkan dalam Al.Quran surat Al.Maidah ayat 2 itu menyatakan Umat Islam harus saling membantu, lha jadi anggota DPR, Bupati, Gubernur bahkan Presiden, jika ia menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman kenapa tidak didukung, disamping ia adalah umat islam sendiri dan umat islam wajib memberikan suaranya kepada umat islam juga.[55]

[54] Ibid
[55] Wawancara kepada Abdul qodir Sabtu, 03 Mei 2019

Senada dengan Ustadz Rpn Guru Pondok Pesantren Al.Amin Sampit menyatakan, Politik Identitas itu dibolehkan dalam agama, kenapa dibolehkan pertama menolong sesama umat, kedua membantu keluarga, jadi menurut saya Politik identitas itu misalnya pada Pilpres ya jelas kita meilih yang seide dan sepemahaman dengan kita.[56]

[56] Wawancara dengan Ustadz Rpn, Ponpes Al.Amin Kotim

Ulama LDII Kotawaringin Timur menyatakan bahwa "Politik Identitas sepertinya belum hilang karena Politik Identitas ini masih saja digunakan oleh Politisi dalam menggalang dukungan.

Ditanya bagaimana sikap LDII dalam Pilpres dan Pileg? "Kami di LDII Alhamdulillah jamaah netral karena memang arahan dari pusat bahwa LDII memposisikan diri sebagai netral aktiv seperti Ormas islam lain Muhammadiyah, Persis dan lain-lain ujar Sekum LDII Kabupaten Kotawaringin Timur"[57]

LDII tidak memberikan *signal* atau arahan pada Capres tertentu " Kami menghimbau warga LDII untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebenar-benarnya, jangan sampai Golput, Karen Golput adalah gagasan orang yang tidak demokratis dan tidak mau berpartisipasi dalam memilih Pemimpin, yang tidak kalah pentingnya adalah LDII tidak terpengaruh dengan Politik Uang. Politik uang itu menciderai demokrasi dan sangat merusak tatanan politik Indonesia.[58]

[57] Wawancara kepada Sekertaris LDII dan Unsur Ketua LDII Kab.Kotim Selasa, 9 Juli 2019
[58] Ibid

Wawancara dengan Pengurus LDII Kotim

Foto bersama dengan Pengurus LDII Kotim

Salah seorang Ustadz Pimpinan Pengajian di Palangkaraya Ust. KH. M menyatakan bahwa Politik Identitas diperlukan oleh umat Islam.

"*memang saat ini menurut kita, manusia ni yang jar Rasulullah tu tahu ja bebuhan pian. Ulun dipengajian pilihlah orang yang seagama, nyata-nyata baik perilakunya, berjuangnya. Tapi ulun kadada menampakkan diri ke satu atau dua. Rancak tu ulun sentil jua pas bulan puasa ulun ni lain orang organisasi lain orang kenapa-kenapa, ini kalau menurut pengamatan ulun yang nyaman di paraki ni partai.....bukan partai nang mamusuhi Islam dan umat islam*[59]*"*

Selanjutnya tentang Suku, Ustadz ini memberikan stetmen agak longgar "*kada jua, bila orang banjar kurang baik yang jawa banyak jua yang baik lawan sorang, organisasinya NU atau Muhammadiyah pang kada jadi masalah.* ***Agama yang penting***" menurut beliau Suku itu tidak terlalu dipusingkan yang penting agamanya dan pilihlah seagama. Dan Ustadz ini justru menganjurkan Politik Identitas teruatama pilih seagama karena menurut beliau " *urang lain damintu jua, inya mamilih*

[59] Wawancara kepada KH.Muhsin Selasa, 23 Mei 2019

saagama lawan inya, napa maka kita kada boleh mamilih saagama lawan kita, asa aneh banar pang"[60]

Lebih jauh Ustadz M mengatakan,*"memang saat ini menurut kita, manusia ni yang jar Rasulullah tu tahu ja bebuhan pian. Ulun dipengajian pilihlah orang yang seagama, nyata-nyata baik perilakunya, berjuangnya. Tapi ulun kadada menampakkan diri ke satu atau dua. Rancak tu ulun sentil jua pas bulan puasa ulun ni lain orang organisasi lain orang kenapa-kenapa, ini kalau menurut pengamatan ulun yang nyaman di paraki ni golkar.*[61]

Ust. AI di Palangkaraya secara diplomatis mengatakan bahwa yang dipilih adalah yang paling taqwa itu artinya pilihan

[60] Wawancara kepada KH.Muhsin Selasa, 23 Mei 2019
[61] Wawancara kepada KH.Muhsin Selasa, 23 Mei 2019

keyakinan menjadi tolok ukur sebuah pilihan "*kelihatannya memang ada pengaruhnya pang tapi kita sedikitpun tidak melibatkan diri jadi kita hanya di tengah-tengah kita kada menampakkan. Kita ambil umum aja lah pilih aja siapa yang paling taqwa bila ada yang betakun*"[62]

Ust. AI mengatakan bahwa ormas tertentu memang ada arahan untuk memilih salah satu pasangan calon, dan itu menurut saya sah-sah saja, karena calon itu memang berasal dari ormas Islam terbesar di Indonesia, dan secara otomatis warganya akan mendukung pasangan calon itu.

Ustadz FK dai muda dari Muara Teweh,

"memahami Politik Identitas itu bagi umat Islam hukumnya wajib, wajib memilih Pemimpin seagama dan ser aqidah. Al.Quran sudah menuntun kita surat Al.Maidah ayat 51. Dan di agama lainpun demikian, coba lihat pidato Pendeta pendukung Ahok, ya sama mereka juga akan memilih Pemimpin se Ras dan Se agama dengan mereka, yang aneh mengapa umat islam menggunakan Politik Identitas di caci maki malah dianggap merusak demokrasi?, ini tidak adil, lihat mereka China kompak memilih wakilnya juga China, dan orang China tidak akan memilih Politisi China yang bukan seagama dengan mereka dan

[62] Wawancara dengan Ustdz AI di Palangkaraya

itu fakta. Jadi menurut saya Politik Identitas itu sangat wajar dan sah-sah saja dalam berdemokrasi.[63]

Ustadz T memaparkan, bahwa,

"Politik Identitas itu membawa Identitas dalam kancah perpolitikan, Identitas itu bisa Marga, bisa suku, bisa agama dan bisa ideology, menurut saya itu hak politisi, namun Politisi harus arif dan bijaksana dalam berkampanye, jika dilingkungan sendiri, misalnya di masjid atau di gereja silahkan namun sangat tidak bermartabat jika dilakukan di halayak ramai, misalnya pidato kampanye terbuka. Jadi menurut saya silahkan gunakan politik Identitas dengan arif dan bijaksana.[64]

Ustadz A adalah Ulama dan Cendikia Kota Palangkaraya ini mendefinisikan Politik Identitas:

"Mungkin beginilah kalo politik dikaitkan dengan indetitas sebetulnya tidak ada yang salah bahkan bisa kita anggap sebagai sesuatu yang wajar, karena indetitas itu bersifat fitrah sebetulnya semua orang itu ingin mengaktualisasikan indetitasnya termasuk pilihan-pilihan politiknya. Bahkan untuk mewujudkannya itulah kemudian dia harus memperjelas atau

[63] Wawancara kepada FK. Muara Teweh
[64] Wawancara dengan Ustadz T Muara Teweh

kemudian memberikan dukungan terhadap orang yang sejalan dengan indetitas dirinya" [65]

Ditanya bentuk-bentuk atau pola Politik identitas dalam dunia Politik, Ustadz A menjelaskan "Orang muslim misalkan secara fitrah dalam hatinya merasa bahwa pemimpin itu cocok bagi saya yang seagama dan itu juga mungkin ada pada agama lain sebetulnya walaupun itu mungkin tidak terpublis karena ini disimpan sebetulnya dalam hati. Termasuk juga masalah suku factor itu juga walaupun tidak terpublis orang itu merasa senang kalau sukunya itu sukses menjadi pemimpin atau kemudian orang yang dia dukung adalah orang yang satu suku dengan dirinya jadi indetitas keagamaan, kesukuan bahkan lebih kecil lagi, warga, tetangga, RT,RW, satu marga, miasalkan sama-sama Kapuas kan bedakan dengan orang barito termasuk juga ormas misalkan, inikan orang akan merasa ada kesenangan yang dia rasakan kepuasan tatkala orang yang dia kenal yang dia tau indetitasnya orang yang sudah berhasil nah jadi itu adalah suatu hal yang bersifat wajar behkan bersifat firah dan ikatan yang kuat setelah ikatan agama itu adalah ikatan suku"[66]

Politik identitas yang paling kental kita lihat di Pemilihan Gubernur DKI dimana kedua Paslon baik Ahok

[65] Wawancara Ustadz A di Palangkaraya
[66] Ustadz A palangkaraya

maupun Anis Baswedan sama-sama menggunakan Politik Identitas kata Ustadz A yang juga Pembimbing Ibadah Umrah dan haji ini, beliau mencontohkan bagaimana jika Ahok akan ikut bertanding dalam Pilgub Kalteng pada 2020. "sederhananya beginilah ada wacana ini untuk pilgub 2020 nanti ahok akan dicalonkan disini kira2 orang Dayak bisa menerima tidak, walaupun kita ini mengklaim atau jargon kita kota pancasila itukan mengakomodir semuanya dan ditakdirkan seperti itu ada secara nurani orangkan ada ini ko ada orang luar ya nah itu pasti muncul apapun agamanya nah tinggal kemudian yang perlu jadi catatan itu adalah silahkan orang menentukan pilihan memberikan dukungan sesuai dengan indetitasnya, tapi dia harus tetap dalam koridor kita kemudian terikat dengan aturan main yang sudah diberlakukan pemerintah mungkin, kalo kita kaitannya pemilu, ada KPU kemudian ada seterusnya selama aturan2 ini tidak dilanggar seterusnya tidak masalah orang kemudian berpolitik lalu mengedepankan masalah terkait masalah indtitas tadi karena itu suatu hal yang saya pikir wajar terjadi.[67]

Ustadz A, menilai wajar saja jika ulama berpolitik praktis, itu adalah hak warga Negara, pada posisi manapun dia,

[67] Ibid

memilki kesempatan dan hak untuk dipilih dan memilih dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunana bangsa ini "siapapun silahkan untuk berpolitik praktis, tidak ada larangan, dinegara demokrasi semua warga Negara memiliki hak untuk menjadi pejabat baikl sebagai praktisi maupun politisi"[68]

Lebih jauh Ust.A menjelaskan bahwa Politik Identitas itu sudah sejak lama ada di Indonesia.

"Sebetulnya itukan tidak terungkap kepublik antara keinginan seseorang yang ingin mereka merespon dan mendukung politik indetitas itukan sama istilahnya dengan primoldial kembali kepada, dulu tidak ada masalah kita ini memiliki sejarah pemilu yang sebetulnya yang bisa jadikan patokan dulu politik berindetitas malah PKI sendiri memiliki partainya sendiri, MASYUMI jelas indetitasnya muslim, PNI nasionalis, Partai Kristen juga ada dulu bahkan itulah kamudian jadi pondasi negri ini, tinggal kemudian kedewasaan dari politisinya sendiri ya kemudian jangan ada yang mempolitisir masalah ini untuk kepentingan sesaat nah saya pikir kalau ada ungkapan seperti itu juga berpolitik sesungguhnya jadi ungkapan itu ungkapan politis, misalkan politik indetitas itu bisa memecah persatuan seterusnya memangnya selama ini tidak bersatu gak

[68] Ustadz A Palangkaraya

ini pun belum bersatu ada pun ini tetap aja hasilnya jangan keliru juga salah lalu politik indetitas di anggap mempereratkan merkatkan masyarakat gak ada inipun masyarakat belum rekat karena masalah ini.

Ditanya mengapa harus menggunakan isu Politik Identitas Ustadz A mengatakan, "Ekonomi, kesenjangan masalah ekonomi yang begini mungkin isu tenaga kerja yang prioritas kepada tenaga kerja asing dan seterusnya isu2 ini malah banyak jauh lebih dominan kemudian tensi perpecahan itu muncul tanpa ada istilah politik indetitas lain halnya kita ini sudah akur dan sebagainya tiba2 rill terlihat dimasyarakat berpolitik bawa-bawa agama lalu kemudian membuat masyarakat jadi pecah itukan jelas, tapikan itu tanpa ada politik indetitas pun potensi perpecahan dimasyarakat sejak awal sudah ada jadi itu kurang tepat menurut saya dan perlu rill di buktikan dilapangan secara empiris misalkan apakah politik indetitas itu memperkeruh suasana yang ada atau kemudian dianggap kurang nasionalis anti NKRI seterusnya. Sekarang kalo diukur yang paling Pancasilais itu siapa, kan itu juga siapa orang yang paling nasionalis kalo kita kembali kesitu siapa yang paling betul-betul orang NKRI nah inikan perlu dijawab dengan klier agar betul-betul tau apakah orang yang mengedepankan politik idetitas itu menjadi sumber masalah terhadap ini,

sekarang kita tanya yang paling pancasilais siapa,yang paling nasionalis siapa, yang paling menjaga NKRI siapa, nah kalo kita masih belum menemukan jawaban ini maka jangan disalahkan pada orang berpolitik lalu mengedepankan indetitas tadi" [69]

Jadi politik identitas belum dapat dihapus? Pendapat beliau, "orang muslim berusaha memilih muslim, lalu ia berusaha memperjuangkan dengan cara2 demokrasi, dengan logika2 demokrasi kemudian tidak ada pemaksaan kehendaknya terus gool apakah ini dianggap indetitas, contohkan misalkan kalau mau sekarang DKI Jakarta dulu Ahok apakah dia berkuasa melakukan indetitasnya, lalu diganti Anis Baswedan inikan tipologi yang berbeda maaf satu cina dan satu arab dan artinya rill ada di tengah masyarakat indetitas suku menonjol ini sudah cina Kristen ini sudah arab Muslim nah ini indetitas sebetulnya nah tinggal lalu kemudian orang berpolitik itu seksi artinya bicara politik itu mesti kepublik kan jadi sasaran, lain halnya guru bersedekah takkan terpublis nah namanya politik itu pasti masuk expos harus ada muncul, nah jadi apa yang kita salahkan dan dari Ahok yang pernah menjadi Gubernur DKI lalu kemudian ada kebijakannya yang dianggap mengorbankan atau tidak mendukung indetitas yang lain pernah membuat kebijakan penyembelihan hewan kurban tidak

[69] Ibid

boleh di masjid2 oleh Gubernur yang sekarang dikembalikan nah apakah ini sebagai contoh bahwa politik indetitas itu ternyata juga diterapkan misalkan NTT sekarang minuman keras boleh bahkan dieskpos ini pemasokan daerah dan ini budaya daerah nah sementara muslim begitu nah inikan indetitas juga malah terang-terangan memberikan dukungan, karena saya ini barang kali masyarakatnya banyak hobby minum itu dan saya sekarang adalah menjadi pemimpin ditengah-tengah mereka maka saya mengakomodir indetitas yang biasa yang dilakukan oleh masyarakat dan seterusnya nah akhirnya ternyatakan tidak begitu relevan juga perdebatan tentang indetitas atau tidak itu, artinya kalo itu dianggap suatu hal yang bisa dianggap memecah potensi masyarakat dan sebagainya tanpa istilah inipun masyarakat memiliki potensi pecah lewat yang lain.[70]"

[70] Ibid

Ustadz Z salah satu Pimpinan MUI Kota Palangkaraya menyebutkan "bahwa dari sisi negatifnya bahwa Politik Identitas itu sangat belum bisa dihapus, karena pertama, rakyat Indonesia belum sejahtera, maksud saya sejahtera itu adalah belum memiliki pengetahuan, pengalaman berdemokrasi yang baik, sejahtera berikutnya adalah rakyat kita ini masih belum merata tingkat ekonominya masih dibawah rata-rata jadi kondisi inilah yang memungkinkan Politik Identitas dan Money Politik merajalela. Kedua, Politisi kita belum terlalu matang untuk berpolitik, mengapa hanya nafsu saja ingin berkuasa, artinya lembaga DPRD,DPR dan lain-lain hanya untuk mencari nafkah bukan untuk pengabdian, nah untuk mencapai itu maka menghalalkan segala cara termasuk Politik Identitas dan Money Politik. Ketiga menurut saya Politik Identitas dan Money Politik

adalah dua jalur yang sama dalam politik, mereka digunakan untuk mendulang suara

Menurut beliau ada sisi positifnya "menurut saya banyak sisi positifnya, karena politisi yang didukung oleh kelompoknya jelas akan memperjuangkan aspirasi kelompoknya. Mohon maaf selama ini kita merasakan ada ketidak nyamanan jika kita dipimpin oleh orang lain, meskipun pada kasat mata pimpinan itu baik di mata kelompok kita, namun melihat dari sisi kebijakan, ya Umat islam tetap aja terzolimi, seperti kebijakan kegiatan keagamaan, masa umat kita jumlahnya banyak terus dibantu dengan jumlah yang sama dengan mereka yang sedikit, inilah ketimpangan itu, jadi munculnya Politik Identitas berawal dari kebijakan yang seperti itu, hingga muncul pemikiran daripada memilih orang lain lebih baik kita pilih orang kita"[71]

Lebih jauh Ustadz ZA, mempersilahkan ulama untuk berpolitik, "tidak ada larangan ulama untuk berpolitik sepanjang itu untuk kemaslahatan umat, silahkan ikut bermain dengan jujur dan adil. Saya kurang sependapat jika ulama mempelopori money politik atau bahasa lainnya menyogok untuk memilih, justru menurut saya penghasilan dari itu tidak

[71] Wawancara dengan Ustadz ZA Palangkaraya

halal untuk dimakan, namun saya masih bisa memaklumi jika mereka menggunakan Politik Identitas karena itu hanya ajakan saja untuk memilih dia, Ulama menggunakan jargon agama menurut saya boleh-boleh saja, karena memilih Pemimpin seiman itu wajib hukumnya. Namun ada juga ulama menggunakan jargon Daerah, seperti "*Pilihlah Uluh Itah*" kan sama saja namanya Politik Identitas artinya memilih sesuku, sedaerah, bahkan "*sesama itah*" itu bisa diartikan sebagai seagama.[72]

[72] Wawancara kepada Ustadz Zainal ketua MUI Kota Palangkaraya Senin, 22 Juli 2019

Ustadz-Ustadz muda yang diwawancarai oleh Peneliti memiliki sikap yang beragam, misalnya ustadz FK dari Muara teweh, mengatakan bahwa Politik Identitas itu berawal dari ketidak adilan, ketidak pedulian para politisi atau pejabat terhadap ke;lompok-kelompok tertentu.

"Kita lihat dijaman Rasulullah, tidak ada politik kesukuan, yang dulunya di Makkah dikuasai oleh Suku Quraisy, namun setelah Rasulullah hadir sebagai pemimpin yang adil, siddiq, politik identitas tidak ada lagi, lihat sejarah penempatan batu Hajral Aswad, yang dipegang oleh 4 suku besar untuk mengembalikan batu hajral aswad ketenpatnya, ini membuktikan bahwa Politk Identitas sebenarnya bisa tidak terjadi dengan catatan, pemimpin saat ini berlaku adil kepada semua warga negara, tidak memandang agama, suku dan rasnya"[73]

Fenomena Politik Identitas memang sangat ditakuti oleh penganut faham demokratis. Faham demokratis yang tidak melihat asal usul, sepertinya dirusak oleh Politik Identitas disaat penentu kebijakan atau pejabat tidak berlaku adil seperti, penentuan pejabat karier dan saat ini sangat terlihat "jika partai A berkuasa maka jamaah partai A akan menempati posisi-posisi

[73] Ustadz FK Muara Teweh

strategis dalam struktur jabatannya, meskipun terjadi mal kebijakan (salah dalam memposisikan pejabat), menurut Ustadz Muda FK ini terjadi dalam lini-lini kekuasaan, jadi menurut saya inilah yang memicu munculnya Politik identitas."[74]

Ustadz Muda SF da'i muda dari kalangan ormas Islam mentakan " Politik identitas seharusnya tidak terjadi dalam semua lini kehidupan demokraasi, karena Politik identitas adalah virus yang anti kebhinekaan dan keragaman."

Ditanya mengapa ada muncul Politik identitas? "Menurut saya politik Identitas itu muncul dari keinginan kelompok tertentu untuk memposisikan diri mereka dalam kepemerintahan, mengusik pemerintahan yang sah yang dipilih secara demokratis, anda lihat ada beberapa ormas yang dibubarkan oleh pemerintah dan itulah mereka yang mendengungkan politik identitas."[75]

Lebih jauh peneliti menanyakan sikap Ustadz dalam Pilpres, ustadz ini berkelit tidak mau memberikan jawaban.

Ulama-ulama muda yang diwawancarai oleh Peneliti hampir semua mengatakan Politik Identitas berawal dari

[74] Ibid
[75] Ustadz SF Muara Teweh

ketimpangan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat baik dipusat maupun di daerah. Hanya beberapa ulama muda yang menyangkalnya bahwa, dengan argument bahwa fenomena Politik identitas itu merusak tatanan demokratis.

Beberapa rangkaian pendapat ulama baik yang terstruktur dalam organisasi Majelis Ulama dan Ormas Islam, mengakui bahwa Politik Identitas suka tidak suka masih ada ditengah-tengah masyarakat dan digunakan oleh Politisi, Birokrasi dalam mencari dukungan Politik.

B. Peran Ulama Kalimantan tengah terhadap Politik Identitas dalam mempengaruhi pemilih dalam kontestasi Pilres tahun 2019

Berdasarkan data KPU bahwa di kubu dua kontestan Pilpres di Kalimantan tengah banyak juga terkumpul Ulama sebagai simpatisan bukan Juru Kampanye kubu tertentu, baik yang terstruktur maupun non struktur. Ulama yang justru menjadi Jurkam Kontestan Partai tertentu sepertinya banyak juga eksis dalam kegiatan baik Partai maupun timses Capres di kedua kubu. Bagaimana peran mereka dalam memengaruhi masyarakat pemilih dapat kita lihat dalam wawancara Peneliti

di bawah ini.(KPU tidak bisa memberikan data berkaitan dengan jumlah ulama yang masuk dalam kontestan Pemilu)

Ust. AG salah satu ulama yang merupakan simpatisan Kubu tertentu, beliau secara gamblang memaparkan bahwa setiap dia ceramah selalu menyelipkan ajakan untuk memilih Capres tertentu.

"Saya bersama ormas Islam lainnya membantu KPUD untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan Pemilu kepada masyarakat, dikelompok pengajian, di kelompok yasinan dan masyarakat luas agar Pemilu kita bisa berjalan sukses dan saya memilki kelompok-kelompok pengajian baik kelompok Bapak maupun yasinan Ibu-Ibu, setiap kali ceramah sosialisasi maka adalah sedikit saya selipkan materi ajakan memilih calon presiden tertentu, namun itu bukan paksaan hanya himbauan saja, soal nanti jamaah memilih di bilik suara itu hak mereka[76]"

Berbeda dengan Ust.S di Sampit, beliau tidak sedikitpun menyinggung soal Pilpres, "saya fokus pada kajian agama, dan jika ada yang bertanya saya akan menjawab terserah masing-masing saja. Kenapa demikian karena saya beranggapan Pilpres itu hanya lima tahun sekali dan pada saatnya akan berganti dan

[76] Wawancara dengan Ketua MUI, Kabupaten Barito Utara KH.Ahmad Gazali,S.PdI Minggu, 14 April 2019

berganti secara terus menerus, jadi biarlah umat yang menentukan sendiri pilihannya"[77]

Sedangkan Ust. Prn di Sampit, Alhamdulillah kedua calon Presiden kita kan semua Muslim dan saya bersikap netral aja siapun terpilih asal dengan jujur dan adil. Jika ada jamaah bertanya tentang siapa yang dipilih saya hanya memberikan nasehat gunakan hak dengan sebaik-baiknya jangan Golput, soal pilihan jika sempat jamaah berkah dan kemaslahatan.[78]

Mempengaruhi pemilih Ustadz KH AH, "dalam berda'wah saya mengutamakan pengetahuan Agama jarang membawa politik apalagi mengajak mendukung pada salah satu Pilpres kita, semuanya diserah kepada jamaah untuk menggunakan hak pilihnya secara baik. Dan saya menyampaikan jangan sampai ada jamaah yang Golput karena memilih pimpinan adalah bagian dari ajaran Islam."[79]

Ustadz M dari Kotim mengatakan, "kami Muhammadiyah DP Muhammaadiyah Kab.Kotim melanjutkan instruksi dari PP Muhammadiyah bahwa warga

[77] Ustadz S, Sampit Kotim
[78] Ustadz Prn Sampit
[79] Ustadz AG Muara teweh

Muhammadiyah netral aktiv, artinya tidak memihak pada kontestan Pemilu ataupun Pilpres.[80]

Menurut beliau tidak ada arahan pimpinan Pusat Muhammadiyah mengarah pada salah satu Paslon Presiden, "Warga Muhammadiyah silahkan gunakan hak pilihnya tanpa inters dari Pimpinan daerah".[81]

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur menghimbau kepada warga Muhammadiyah agar menggunakan hak suaranya dengan baik "Kami menganjurkan atau menghimbau warga Muhammadiyah jangan Golput, gunakan haknya untuk berpartisipasi dalam kancah Pemilu.[82]

Himbauan berikutnya adalah warga Muhammadiyah menolak Politik Uang "Satu hal kami warga Muhammadiyah menolak Money Politik dan menginginkan Pemilu Legislatif dan pilpres ini berjalan jujur dan adil siapapun pemenangnya. Jadi kami tidak mempengaruhi jamaah dalam memilih silahkan berdasarkan hak dan hati nurani warga" Apakah ada warga Muhammadiyah yang ikut dalam Kontestasi Pemilu Legislatif? "Memang ada namun sepanjang saya tahu, politikus itu tidak

[80] Ustadz M Sampit
[81] Ustadz M Sampit
[82] ibid

terang-terangan untuk mengajak dan mempengaruhi warga untuk berpihak, dan ya ternyata memang tidak terpilih.[83]

Salah satu tokoh NU di Barito Utara, Ustadz AG secara organisatoris NU jelas mendukung calon dari NU, jadi saya setiap kesempatan pengajian atau ceramah agama pastilah mengajak jamaah mendukung paslon dari NU.“ Ulama-ulama atau tuan-tuan Guru yang terjun kepolitik, mayoritas dalam Pengajian-pengajian atau ceramah agama pastilah terselip ajakan untuk memilih dirinya atau calon lain yang terkait kerabatnya, termasuk Pemilihan Presiden ulama-ulama itu baik yang dikubu 01 atau 02 sudah pastilah mengajak kelompoknya untuk memilih calon yang diinginkan.[84]

Bagaimana peran ulama mempengaruhi Pemilih Ustadz AG mengatakan “tergantung ulamanya, jika ulama itu berpolitik atau ikut DPD atau Pilkada ya pastilah, karena mereka ingin memang dalam kontes pemilu. Ajakan-ajakan itu baik berupa sms (Shot Masenger System), Whats APP (WA) dan lain-lain akan bermunculan nama Group, Kawan Guru, Simpatisan Partai, yang secara intens memberikan informasi ajakan dan

[83] Wawancara kepada Mahyudin Sabtu, 03 Mei 2019

[84] Wawancara dengan Ketua MUI, Kabupaten Barito Utara KH.Ahmad Gazali,S.PdI Minggu, 14 April 2019

karya yang bersangkutan agar bisa dipilih oleh masyarakat. Apalagi lewat ceramah, pengajian. Kadang satu setengah jam penyampaian ilmu agamanya hanya setengah jam sisanya memaparkan visi miss dan janji-janji bila ia terpilih[85]"

Tidak semua ulama yang seperti itu, banyak juga ulama yang tidak mau diganggu jargon-jargon politik, bahkan jika ada lambang partai atau gambar calon baik legislative maupun Presiden, Beliau batal hadir seperti diungkapkan oleh Ustdz Prn di sampit " jika di situ ada lambing partai atau caleg partai atau DPD ulun pasti membatalkan hadir sebelum itu di copot, atau ulun bapadah badahulu lawan panitia jangan sampai ada lambing partai atau gambar caleg,kita bakalahi badahulu haja, Karen ulun handak netral semua kajian ulun hanya kajian agama kada bapolitik"[86]

Ustadz U mengatakan, "saya sering mendapat permohonan untuk berceramah jika saya lihat disitu ada Caleg atau Tim Sukses calon Presiden tertentu di awal ceramah saya mengatakan "jika ini ajang kampanye, mohon maaf saya bukan jurkam dan saya mohon diri, karena diundangan saya diminta untuk ceramah Pengajian Agama, jika ini pengajian saya siap dan mohon jangan bertanya tentang Politik" Jika ada yang

[85] Ibid
[86] Ustadz Prn Sampit

minta pendapat saya akan menjelaskan bagaimana memilih Pemimpin berdasarkan Sunnah Rasulullah karena ada rambu-rambu Islam cara memilih Pemimpin,Alhamdulillah saya di ajak oleh Panwascam, Kapolsek dan Kecamatan untuk mensosialisasikan proses Pemilu baik Legislatif maupun Presiden, dan saya menganjurkan warga masyarakat jangan Golput, karena Golput beerarti warga tidak menggunakan haknya dalam memilih Pemimpin, sangat sayang suaranya, padahal bisa saja suara beliau itu menjadi penentu bagi Calon pemimpin.[87]"

Ustadz H menyebutkan bagaimana peran ulama dalam mempengaruhi Pemilih, "ya tentunya kita lihat dalam konteks Pemilih Calon Legislatif atau Pilpres, jika ini yang dimaksudkan tentunya saya tidak memiliki kafasitas menjawabnya, karena saya bukan anggota Partai dan bukan pula partisan partai, namun saya hanya berpesan kepada Umat, jika memilih Pemimpin sesuaikan dengan hati nurani, pilihlah yang berakhlaq, memiliki keimanan yang kuat, ya tentunya anda maklum karena saya muslim ya tentunya jika saya tetap akan memilih calon Pemimpin yang seiman dengan saya, mana mungkin suara saya saya serahkan kepada orang yg tidak peduli dengan agama saya, dan ini saya sampaikan keumat, bahwa

[87] Wawancara kepada U Sampit

begitulah prinsip saya dalam memilih pemimpin, jika umat setuju dengan langkah saya silahkan ikuti, dan jika tidak itu adalah pilihan hati nurani sendiri.[88]

Pendapat Ustadz S pimpinan LDII Kab. Barito Utara, "menjawab pertanyaan ini gampang-gampang susah, LDII itu tidak memiliki caloyang dipasangkan di DPRD Kab.Barito Utara, jadi saya bersamaa warga LDII bersikap netral saja, namun tetap digaris komando Pusat bahwa LDII tetap memilih pemimpin seiman dengan kita. LDII selalu di undang oleh KPU untuk mensosialisaasikan tahapan-tahapan Pemilu baik di warga maupun dimasyarakat umum. Dan kami hanya berpesan agar warga jangan Golput karena jika golput saying suara umat Islam akan berkurang.[89]

Ustadz R, Pimpinan Pondok Yasin, memberikan komentar bahwa, "upaya mempengaruhi umat atau kaum muslimin dalam Pemilu, jika ini arahnya pada Caleg maaf kami tidak pernah diberi pesan atau diberi amanah untuk menyampaikan sesuatu untuk memilih yang bersangkutan, dulu ada fitnah seperti itu, bahkan di beritakan di Media massa bahwa Ustadz R mendukung seseorang menjadi Caleg dan itu hanya Hoak saja. Dan saya sudah klarifikasi kepada yang

[88] Ustadz H Sampit
[89] Wawancara kepada M. Arifin, M.Pd Selasa, 16 April 2019

bersangkutan dan kemedia itu, dan kami saling memaafkan dan itu sangat indah. Sama halnya dengan Pilpres memang ada beberapa timses dating ke saya namun secara halus saya tolak karena Ulama ini miliki umat dan saya tidak boleh mempengaruhi hak umat untuk memilih, hanya saja saya berpesan kepada umat agar pilihlah yang beriman, taat beribadah dan peduli sama agama dan masyarakat kecil.[90]

Pimpinan Muhammadiyah Daerah Barito Utara mengatakan bahwa, "Ulama di Muhammadiyah memang ada beberapa orang menjadi Calon Legislatif, ya tentunya wajarlah jika ada ajakan-ajakan untuk mempengaruhi warga, namun itu hanya sekedar ajakan saja dan insha Allah warga Muhammadiyah akan selalu netral dan menjaga stabilitas politik dengan baik."[91]

Ustadz FK mengatakan, "menurut saya, jika ada ulama berpolitik, dia bukan ulama lagi, dia sudah menjadi Politisi, dia sudah terjun kedua praktis pragmatis, nah sangat wajarlah jika politisi itu memengaruhi masyarakat untuk memilih dia, dan juga wajar jika kelompoknya sendiri juga diajak memilih dia,

[90] Wawancara kepada KH.Rusmadi Senin, 15 April 2019
[91] Ustadz M PDM Muahammadiyah Barut

namun diingat, masyarakat Muslim saat ini sudah cerdas dia bisa memilih mana yang *antah* mana yang *baras.*"[92]

Dalam mempengaruhi pemilih Ustadz-Ustadz muda yang terjun kepolitik justru agak berbeda dengan ulama politisi yang sudah berumur 50 tahunan keatas seperti terekam dalam wawancara berikut ini.

Ustadz RD (57 th), politisi dari salah satu partai Islam mengatakatan " saya menggunakan jasa anak-anak muda untuk membentuk group-group di media social, seperti group saya Sahabat RD Berkah dan namanya satu saja baik di WA, FB maupun Istagram."[93]

Bentuk-bentuk ajakan saya, yaitu salahsatunya ajakan memilih "sesame itah" atau menggunakan jargo-jargo milineal seperti ".....mudapendobrak, anti korup dll, follower saya lebih dari 2 ribu se daerah Pemilihan saya.Follower saya adalah anak-anak muda, pelajar kelas XII dan Mahasiswa"[94]

HJ.N, juga politisi wanita yang berasal dari Partai Islam "saya banyak berinteraksi dengan calon pemilih melalui Media Sosial, tim saya membuat akun Group seperti WA, FB dan istagram, follower saya lumayan seribu lebih, hal-hal yang saya

[92] Ustadz FK Muara Teweh
[93] Ustadz RD Palangkaraya
[94] Ibid

sampaikan kepada calon pemilih di media social adalah issu pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan issu pembangunan daerah yang lagi trend saat ini adalah upaya menembus isolasi daerah melalui infrastruktur jalan dan jembatan dan ini lah yang akan saya perjuangkan untuk daerah pemilihan saya.[95]

C. Upaya Ulama dalam mendinginkan suasana umat Pasca Pilpres 2019.

Setelah Pemilu Presiden sudah selesai, masyarakat Indonesia yang sudah mengeluarkan energy yang begitu banyak, uang tenaga pikiran bahkan perasaan, benturan kepentingan yang sangat dahsyat hingga membuat rakyat Indonesia yang terpecah terbagi dalam kelompok-kelompok yang cukup menghawatirkan.

Perpecahan yang sangat luas ini, sangat berbahaya bila terlalu lama dibiarkan dan bisa mengancam keutuhan NKRI, oleh sebab itu seluruh komponen bangsa berupaya untuk merekatkan kembali ukhuwah yang terpecah akibat gesekan politik yang begitu tajam. Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat agamis ini, terpecah oleh politik praktis yang hanya

[95] Ustadzah N Palangakaraya

sesaat. Upaya mendinginkan suasana efek perhelatan Politik 5 tahun sekali ini salahsatunya adalah menggunakan tangan dan bahasa ulama. Peran Ulama dianggap sangat strategi karena melihat bangsa Indonesia ini aalah bangsa agamis dan insha Allah dengan bahasa ulama suasana akan kmbali normal, dan semangat untuk membangun akan bergelora lagi. Nah bagaimana peran ulama Kalimantan tengah dalam mendinginkan suasana efek dari Perhelatan Politik 5 tahun sekali mari kita lihat wawancara Peneliti dengan tokoh Ulama Kalimantan Tengah dibawah ini.

KH.AH, Ketua Umum MUI Kotawaringin Timur, mengatakan, "kami telah mengadakan rapat internal MUI Kotim seminggu setelah Pemilu selesai dilaksanakan, menyikapi kondisi pasca Pilpres yang kondisinya cukup panas di kalangan masyarakat bawah. Hasil rapat internal ini sepakat bahwa 1. Ulama yang selama ini bersebrangan diupayakan Islah/rujuk kembali, Pesta Politik yang hanya 5 tahun sekali jangan membuat kita terpecah "*balawasan"*, jangan jadi dosa "*sapanjangan"* Pemilu sudah "*tuntung"* yuk kembali lagi kita bersama-sama membina Umat 2. Masing-masing ormas Islam, harus segera kelapangan memberikan pencerahan kepada umat, bahwa ukhuwah Islamiyah lebih penting untuk dijalin kembali. 3. Untuk menjaga keutuhan umat bila ada provokator segera

serahkan kepada yang berwajib 4. Menyikapi berita di Media Sosial hendaknya lebih arif, ormas Islam jangan ikut memperuncing suasana, lebih baik diam tidak usah reaktif dan tidak perlu ikut menyebarkan konten-konten yang berbau perpecahan.Setelah itu kita rapat dengan pihak Kapolres, Kodim, Pemda, Kemenag, dan Ormas-orma lain, untuk merumuskan kebijakan Pasca Pileg dan Pilpres dan semua sepakat untuk segera melakukan penyegaran dan penenangan kembali. Demikian isi rapat itu, dan Alhamdulillah setelah rapat itu semua bergerak menenangkan umat, NU, Muhammadiyah, LDII, Pimpinan Pondok, Masjid Raya, semua turun lapangan dan hailnya Alhamdulillah Kabupaten Kotawaringin timur, aman dan stabil.[96]

KH.AH mantan Kepala Kemenag Kabupaten Kotim dan Wakil Bupati Kotim ini, mengakui jika Kabupaten Kotim ini masuk daerah yang rawan politik, karena masyarakat Kotawaringin Timur ini sangat beragam dan penduduknya sudah kritis terhadap kebijakan pemerintah, oleh sebab itu saat ini masyarakat Kotawaringin Timur kembali melaksanakan aktivitas rutinnya ya yang jadi pedagang kembali berdagang, yang politisi jika terpilih Alhamdulillah, yang tidak terpilih jika

[96] Wawancara kepada H.Mudlofar,SH,MM Selasa, 9 Juli 2019

stress ya kita anjurkan untuk berobat dan semua melaksanakan kegiatan kemasyarakatannya masing-masing.[97]

KH. Z I, Ketua Umum MUI Kota Palangkaraya mengatakan, "Pasca Pilpres di Kota Palangkaraya menurut pengamatan saya memang agak memanas, kalahnya Kontestan 02 membawa reaaksi ketidakpuasan pendukungnya, media social dibanjiri caci,maki dan hujatan kecurangan baik oleh peyelenggara maupun ulah oknum yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kondisi ini membuat suasana panas semakin membara, apalagi bermunculan berita meninggalnya ratusan petugas PPS dan lain-lain. Tentunya kita juga prihatin melihat kondisi ini, namun apakah kita hanya berdiam diri menonton ketidakstabilan itu,tentunya tidak, saya bersama-sama dengan kawan-kawan Pengurus MUI Kota Palangkaraya segera menyikapi masalah ini dengan mengadakan Rapat bersama seluruh Pengurus Ormas Islam yang tergabung dalam MUI, pihak Kaporesta, Kodim, dan Walikota palangkaraya, untuk mengambil langkah-langkah antisipasi keadaan Pasca Pilpres. Dalam rapat tersebut kami mengambil kebijakan 1. Semua unsur ulama, dai, Guru-Guru Ta'lim, untuk membantu menenangkan umat, dan berupaya mengislahkan yang dulunya bertikai hebat dalam mendukung masing-masing calon,

[97] Ustad S Sampit

sekarang mari kembali ke posisi nol, yaitu damai jalin ukhuwah agar kita bisa hidup dengan tenang dan damai. 2.Menangkal berita-berita Hoak di media social 3.memberikan pencerahan kepada umat bahwa Ukhuwah itu lebih penting dalam menjalankan syariat agama. Dan kita rasakan saat ini Kota Palangkaraya sudah kondusip dan damai. Upaya mengislahkan Ulama kedua kubu pendukung sudah kita lakukan dan Alhamdulillah ulama-ulama ini sudah saling berangkulan dan saling memaafkan dan itu yang membuat hati kita lega. Nah tinggal bagaimana kita mendinginkan akar rumput, ya tentunya kita kembali ke habitat kita masing-masing berikan arahan yang sejuk agar masyarakat yang tadi sempat terpecah biosa bersatu kembali. kita di palangka raya ni sudah mengikuti pemilu dari gusdur, megawati, sby. Yang langsung dari sby, secara umum sby bagus-bagus aja aman damai kalau yang ini secara umum ya banyak keributan, ulama terpecah, demo-demo medsos saja misalnya ulama-ulama yang tidak ikut politik langsung mengatakan langsung yang paling kurang baik menurut umum ulama dan sedikit ada pemilu yang menurut ulum pemilu yang kurang baik.[98]

[98] Wawancara kepada Wawancara dengan Ustadz Zainal ketua MUI Kota Palangkaraya Senin, 22 Juli 2019

KH. AG, Ketum MUI Kabupaten Barito Utara, memaparkan bahwa, "Kabupaten Barito Utara sudah sangat kondusif dan tidak nampak riak-riak gejolak, hingga MUI bersama seluruh Ormas Islam nya bisa bernafas lega dan tidak perlu mengadakan aksi pendinginan "Wilayah Barito Utara sangat kondusif jadi tidak perlu upaya berlebihan dalam mengatasi masalah yang muncul dalam Pilpres dan Pileg tahun 2019 ini, namun kewaspadaan tentu juga harus ada, kita harus pasang telinga pasang mata menjaga keutuhan umat di masyarakat, sepeerti menangkal berita-berita hoak serta issu-issu yang tidak bertanggung jawab, MUI bersama Pemda, aparat keamanan tetap bersiaga mengantisipasi keadaan yang tidak normal.[99]"

Ust.A, Ulama Struktural di Palangkaraya mengatakan "Jadi begini politik inikan sifatnya sesaat kalau kita mau anggap politik praktis inikan Cuma 5 tahunan , jadi jangan sampai 5 tahunan ini mengorbankan kepentingan kita yang banyak dari sisi berbangsa dan bernegara ini dan seterusnya jadi ada hadits nabi itu "**mencintailah sekedarnya saja jangan terlalu berlebihan karena suatu saat bisa jadi engkau membencinya, benci orang itu janganlah sepenuhnya**

[99] Wawancara dengan Ketua MUI, Kabupaten Barito Utara KH.Ahmad Gazali,S.PdI Minggu, 14 April 2019

karena suatu saat engkau mencintainya" begitu kata hadits itu nah ini hanya sifatnya 5 tahunan pro & kotra itu pasti akan ada ujungnya, nah mestinya kalau sudah sampai diujung ya kembali saja kita netral. Selanjutnya Beliau melihat kiprah ulama dalam Politik, "Ulama silahkan dia berpolitik pada saatnya kalau emang diperlukan dan seterusnya ada maslahat ummat gitukan yang jadi ukurannya dan kalau sudah selesai ya kembali lagi mana yang paling maslahat buat ummat itu karena tidak mungkin kita ini selalu tegang terus gak juga banyak gunanya, jadi harus ada jedanya nah jedanyakan 5 tahun 5 tahunkan selesaikan ganti lagi pemimpin buat apa kita terlalu ngotot dan seterusnya pahal inikan 5 tahunan selesai dia, jadi tugas ulama adalah mendinginkan suasana agar tidak tegang lagi, sudah selesai dengan keputusan KPU yaitulah yang sudah terjadi ya masyarakat ditenangkan kembali bagi yang ingin lagi nunggu lai 5 tahun kedepan seperti apa kita berkompetisi secara baik.[100]

Lebih lanjut Ustadz A menilai bahwa Pasca Pilpres itu janganlah disikapi dengan berlebihan namun tetaplah waspada "Kalau yang bersifat lapangan dan seterusnya kita kordinasi dengan aparat keamana dan kordinasinya intenslah karena bagaiamanapun jika ada gerakan2 seterusnya yang dianggap

[100] Ustadz A Palangkaraya

membawa nama ummat dan seterusnya biasanya pihak keamanan juga mengkordinasi dengan MUI menginformasikan seperti misal pernah ada pembakaran symbol tauhid dan sempat bergejolak dibeberapa daerah dan seterusnya disini potensi gerakan yang seperti itu tatkala terbaca oleh aparat keamanan MUI dikontak. Dan MUI menilai sejauh mana pergerakan masa ini bagaiamana usaha kita untuk meredam cukuplah itu peristiwa di jawa saja sini tidak usah dibawa itu selalu ada yang bersifat kordinatif dilapangan. Secara umum MUI sendiri hal2 yang terkait dengan pemilu aman damai dan seterusnya panduan2 itu sejak dari pusat sejak dari awal ada ya misalkan acuan untuk melaksanakan pemilu aman damai dan seterusnya kemudian larangan money politik yang di anggap bagian dari riswah kemudian ya tidak anarkis nah panduan2 seperti ini itu ada dari fatwa MUI sejak awal, panduan umum yang itu diminta disosialisasikan kepada masyarakat. Sebetulnya khusus untuk Kalimantan Tengah sendiri itu kalo ummat Islam dan kita bicara konteksnya sebetulnya tidak ada yang bersifat reaktif terlalu berlebihan dan itu sudah kita sampaikan aparat keamanan, namun kekhawatiran itu sudah pasti ada.[101]"

[101] Ibid

Ust.M. salah satu Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kotawaringin Timur, mengatakan "PDM Kotawaringin Timur memang di ajak oleh Ketum MUI dalam mengantasi bila munculnya suasana caos akibat perpecahan pada perhelatan Pilpres dan Pileg tahun ini, namun ternyata Alhamdulillah Sampit dan sekitarnya aman dan tentram tidak ada satu apapun, meskipun ditataran masyarakat bawah (akar rumput) masih memanas, namun bisa di atasi dengan terjunnya para ulama untuk meredam gejala yang mulai muncul, seperti memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pemilu ini menghantarkan politisi menjadi pemimpin, dan itu hanya 5 tahun sekali, dan janganlah kita akibat beda pilihan jadi terputus silaturrahim sesama umat, dan saya dengan warga Muhammadiyah kaena memang netral namun aktiv ya Alhamdulillah Sampit aman dan terkendali.[102]

[102] Wawancara kepada M PDM Sampit

KH. M. di Palangkaraya mengatakan, “upaya mendinginkan suasana ya harusnya Islah lah, namun saya agak pesimis apakah ulama di kubu 02 mau sebelum semua tuntas masalah Pemilu seperti kecurangan, penggelembungan suara oleh oknum kpps dan lain-lain yang tentunya merugikan pihak 02, jika mereka ikhlas menerima ya ajaran Islam menganjurkan setelah berperkara semestinya Islah saling meminta maaf, karena dosa sesame manusia agak susah meminta ridhonya, kecuali orang yang benar-benar berjiwa besar.Waallahu alam. “Islah, itu satu kata yang ringan diucapkan namun sangat berat untuk dilaksanakan.[103]”

[103] Wawancara kepada KH.Muhsin Selasa, 23 Mei 2019

Ustadz H di Muara Lahei Baarito Utara, "syarat-syarat Islah adalah adanya keikhlasan semua pihak, meridhoi apa yang sudah terzolimi, dan meminta maaf atas salah. Apakah ada salah satunya minta maaf kan tidak ada, nah jika yang bersalah tidak mau meminta maaf, apa yang mau di Islahkan?, islah itu meridhokan dan meminta ridho kan hal yang terjadi, jadi menurut saya Islah tidak akan mungkin bisa dilakukan sepanjang yang bersalah tidak mengakui kesalahannya.Wallahu alam.[104]

Senada dengan Ustadz H, Ustadz R juga dari Barito Utara, "Islah itu adalah Makna kedua dari kata *Al-Ishlah* lawan dari kata *Al-Fasad (kerusakan).* Sehingga pelaku kebaikan dan yang menyeru kepadanya disebut *Al-Muslih* dan yang merusak disebut *Al-Mufsid.* Dalam Al.Quran orang yang melakukan Islah adalah orang yang melakukan kebaikan, Al-islah dalam bahasa Arab berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci (baik) adalah bentuk-bentuk dari ishlah. Pengertian yang beragam itu berasal dari makna islah yang disebut dalam Alquran, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 220

[104] Wawancara kepada Drs. Al-Hadi 12-16 April 2019

dan 228, di Surah An-Nisa' ayat 35 dan 113, Surah Hud ayat 87, serta Surah Al-A'raf ayat 55 dan 85. Sementara dalam bentuk perintah, kata ini disebutkan lima kali, di dalam Surah Al-A'raf ayat 142, Al-Anfal ayat 1, Al-Hujurat ayat 9 dua kali, dan dalam ayat 10. Dalam bahasa Arab modern, istilah ini digunakan untuk pengertian pembaruan (tajdid). Jadi Islah merupakan kewajiban bagi umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan islah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Jika kita lihat konteksnya maka, Islah menurut saya adalah perdamaian sesama umat Islam yang sedang bersengketa, melupakan kesalahan, dan memaafkan kesalahan, jika ini dilakukan oleh kedua kubu, yang lebih bagus adalah siapa yang bersalah itulah dahulu yang mengucapkan minta halal minta ridho, namun ini berat, dari sisi politik rasanya tidak mungkin, oleh sebab itu harus ada mediasi keduanya, dan Ulama lah yang memegang peranan untuk mengislahkan kedua kubu yang sedang bertikai. Oleh sebab itu sampai saat ini tidak ada upaya Islah itu, karena masing-masing merasa benar, dan ulamapun misalnya seperti saya akan susah untuk merujukkan keduanya karena saya tidak ada kepentingan apa-apa dari pertikaian ini. Jadi biarlah Allah yang

mengaturnya, akan kita lihat nanti Allah akan menampakkan siapa yang salah dan siapa yang benar, Wallahu alam.[105]

Sedangkan KH.AI di Palangkaraya, menyebutkan "upaya Islah bisa dilakukan dan dimediasi oleh Ulama yang netral, dan sudah saatnya kita bersatu lagi, karena Pileg dan Pilpres sudah selesai, marilah jangan larut dalam suasana mengambang, karena akan merusak tatanan kenyamanan dan kedamaian bangsa ini. Soal sengketa yang disisakan oleh Pemilu, biarlah aparat yang menyelesaikannya dengan seadil-adilnya.[106]

Ustadz FK dari Muara Teweh, menanggapi "upaya Islah, menurut saya dalam kancah Politik tidak ada Islah, yang ada nikmati kekalahan dan nikmati kemenangan, jika jatuh yuk berjuang lagi pada kesempatan yang lain, itulah Politik jika dikatakan kejam realitanya seperti itu. Pertarungan Politik harus ada yang kalah dan yang menang, ya namanya juga bertarung. Dalam merebut kemenangan harus ada strategi dan jurus-jurus yang akan dipakai, Politik identitas, Money Politik bahkan kecuranganpun bisa digunakan demi meraih ambisi.

[105] Wawancara kepada R M Selasa, 16 April 2019
[106] Wawancara kepada I A Senin, 22 Juli 2019

Proses ini ya memerlukan kedewasaan, jika mau menjadi Politisi ya harus siap mental dan siap berkorban harta dan bahkan nyawa hanya untuk kepentingan ambisi. Kalah dan menang dalam politik memang menyakitkan, kalah sakit bisa gila dan masuk rumah sakit, tidak sedikit kalah Pemilu bisa langsung meninggal dan sebagainya, jadi dalam Politik tidak ada Islah, yang kalah ya nikmati kekalahannya kembali ke nol untuk mengatur strategi berikutnya, yang menang nikmati eforia kemenangannya. Hanya saja, hidup ini jangan melampaui batas dan itu paling tidak disukai Allah, kata Nabi "Cintailah dunia seadanya, jangan melebihi cinta pada Allah dan Rasulnya, janganlah cinta berlebihan jika kalah mari melakukan instrospeksi diri, mengevaluasi strategi mana yang kurang baik hingga bisa bangkit dan berjuang lagi. Dan bagi yang menang segeralah bersyukur, karena kemenangan itupun ujian Allah, janganlah senang berlebihan hingga pesta siang malam, mungkin lebih arif undang rifal politik yang kalah jika mereka mau hadir, dan itu menandakan ketinggian ahlaq seorang manusia. Ujian Allah dengan jabatan itu lebih dahsyat dan sangat menantang, terbukti banyak politisi terjebak Korupsi, narkoba dan lain sebagainya, ya karena melampaui batas, jadi jika anda berhasil banyak-banyak lah bersyukur, berbagilah dengan sesama, jalankan amanah rakyat dengan baik, membela

kepentingan umat. Saya kira itulah yang bisa dilakukan oleh Politisi Muslim menykapi kalah dan menangnya di kancah perpolitikan nasional.[107]

Ustadz T, menyikapi tentang Islah, itu penting bagi yang bersengketa akibat Pemilu sebaiknya kembali berangkulan tangan untuk bersama-sama membangun daerah, membangun bangsa. Jadi yang kalah legowo dengan kekalahannya dan yang menang jangan berlebihan melampiaskan kemenangannya.

[107] Ustadz FK Muara Teweh

BAB V
FENOMENA POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN PRESIDEN

A. Realita Politik Identitas di Pemilu Presiden

Realitanya politik memang dinamis, tidak hanya dalam memilih kawan atau lawan, tetapi juga dalam ideologi dan prinsip. Kita hidup di negara yang multikultural, maka dari itu toleransi atau tenggang rasa sangat dibutuhkan untuk mendasari kehidupan bernegara, karena itu adalah pondasi dasar dari persatuan itu sendiri dan berperan sebagai jembatan agar tercapai budaya politik yang sehat. Acuan Literatur politik maupun sosiologi, mengkategorisasikan identitas dalam dua kategori, yakni: identitas sosial (agama, kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan-*citizenship).*

Identitas sosial menentukan posisi individu di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik

menentukan posisi individu di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan *(sense of otherness).* Dikarenakan identitas juga menyakut apa-apa saja yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya, maka konstruksi identitas berkaitan erat dengan konstruksi mengenai "perbedaan" (*diference).* Identitas politik (*political identity)* secara konseptual berbeda dengan "politik identitas" (politics of identity); identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik.

Menurut Cressida Heyes (dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy 2007) politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. [108]

[108] Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Menguatnya Politik identitas ini dapat kita lihat contoh-contohnya di banyak daerah, yaitu adanya gerakan-gerakan serba kedaerahan, keagamaan, kesukuan, sampai gerakan cara berpakaian yang melambangkan kedaerahan dan keagamaan tertentu. Sebuah gerakan yang berlandaskan identitas dapat disebut sebagai politik identitas, tetapi dalam pengertian teori sosial dan politik.

Politik identitas memiliki makna yang lebih spesifik ketimbang pengertian yang luas. Cressida Heyes memberi definisi politik identitas yang sangat jelas. Menurutnya politik identitas adalah aktivitas politik dalam arti luas yang secara teoritik menemukan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari 'kaum yang terpinggirkan' dalam kondisi sosial, politik, dan kurtural tertentu dalam masyarakat. Perjuangan politik, penggunaan identitas memberi hasil positif yang berpengaruh secara signifikan. Identitas adalah konsep kunci dalam arena politik. Secara teoritik, identitas memiliki definisi yang cukup dalam.Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari, karena itu para ilmuwan yang bergelut

dalam wacana politik identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Misalnya saja Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama.Sedangkan Donald L. Morowitz (1998) dalam Haboddin (2012), pakar politik dari Univeritas Duke, mendefinisikan; politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen. Baik Agnes Heller maupun Donald L. Morowitz memperlihatkan sebuah benang merah yang sama yakni politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Konsep ini juga mewarnai hasil Simposium Asosiasi Politik Internasional diselenggarakan di Wina pada1994.

Fenomena Politik identitas di tengah kancah perpolitikan Indonesia disatu sisi ia adalah momok bagi demokrasi Indonesia, namun disisi lain ia menjadi alat ampuh dalam mendulang suara Pemilih. Responden sepakat bahwa Politik Identitas masih digunakan Politisi dalam mendulang suara Pemilih.

Perhelatan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Kalimantan Tengah ternyata juga diwarnai Politik Identitas, jargon-jargon Politik identitas seperti "……(nama calon) *Uluh Itah*", Pilihlah Seagama, dan lain-lain yang menunjukan bahwa Politik Identitas tetap eksis dan menjadi alat ampuh dalam mendulang suara. Dan Pada Pilpres akan terlihat gambling seperti "Umat Islam bersatu memilih ……), Capres ……. Didukung oleh Ulama Ormas……..Ormas ….. memilih calon kader ormasnya. ……. (nama suku tertentu, mendukung Capres…… dst. Ini jargon-jargon Politik Identitas yang ditampilkan dalam bentu, spanduk, Baliho dan selebaran.

Politik Identitas secara nyata di bawa oleh timses yang berstatus Ulama, hingga pada kesempatan-kesempatan tertentu baik terjadwal atau tidak selalu membuat ajakan yang menonjolkan Identitas. Fenomena ini ternyata sesuai dengan pendapat para Ulama yang telah diwawancarai oleh Peneliti di tiga daerah Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangkaraya, seluruh responden menyatakan bahwa Politik identitas tetap eksis dalam kancah Pemilu, sejak Pilkada Bupati, Wali kota dan Gubernur.

Politik Identitas menjadi salah satu alat kampanye yang ampuh untuk mendulang Suara. Salah satu Contoh, Terpilihnya Habib Ismail dalam Pemilu Tahun 2014 sebagai Legislator DPD

berhasil meraup suara maksimal, sama halnya dengan Pilgub tahun 2015 lalu Politik Identitas tetap eksis menghantarkan Beliau menjadi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

Dan pada Pemilu Legislatif tahun 2019 saat ini salah satu Habib yang diusung oleh partai tertentu berhasil masuk menduduki jabatan anggota DPR RI dan tentunya terlepas iya tidaknya yang bersangkutan menggunakan Politik identitas, wallahu alam namun jika dilihat dari sisi pemilihnya tentu warga beragama Islam, dan juga kelompok-kelompok yang tergabung dalam Halaqah-halaqah kajian yang beliau adalakan.

Responden menyatakan bahwa Politik identitas akan terus digunakan sebagai alat mendulang suara, sepanjang ekonomi dan wawasan politik bangsa ini masih belum merata.

Apakah Politik Identitas itu diiringi dengan Money Politik sepertinya sudah tidak menjadi rahasia umum, bahwa money Politik selalu menggiring Politik Identitas, namun responden agak tidak berani menyebutkan bukti-bukti konkritnya, karena realitas dilapangan itu memang terjadi. Hal ini sesuai pendapat Widiashih (2013) bahwa penggunaan identitas memberi hasil positif yang berpengaruh secara signifikan sebab identitas adalah konsep kunci dalam arena politik. Secara teoritik, identitas memiliki definisi yang cukup

dalam. Dalam kondisi perkembangan politik identitas agama di Indonesia, perjuangan tidak hanya dimunculkan oleh kelompok agama minoritas.

Menurut Isaacs, identitas memiliki fungsi, "Ikatan pertalian dasar (yang) memberikan kepadaseseorang keamanan dan kedamaian dan rasa pengertian di mana ia berada." Bila fungsi ini dikaitkan dengan meningkatnya isu etnis—sebagai bagian dari wacana identitas—belakangan ini, Melani Budianta (dalam sebuah artikelnya, Representasi Kaum Pinggiran dan Kapitalisme, 1999:47), jika menurut teori ini realita " *ayu pilih uluh itah*", " pilih seagama", maka realitas politik Identitas memang selalu menggurita dalam setiap even Pemilu.

Bagaimanakah pola penerapan Politik Identitas itu dilakukan oleh Politikus, beberapa responden menyebutkan bahwa, bahwa setiap sosialisasi secara tertutup dan ditempat tertentu para Politisi dan Timses memberikan issu Identitas jika mereka terpilih menjadi Pemimpin. Dan kepemimpinan hasil dar Politik Identitas jelas akan menempatkan Pemimpin menjadi ekslusif serta orientasi agama yang berlebihan dalam bidang politik praktis oleh para elit menempatkan para pemimpin agama menjadi semakin elit walau dalam waktu yang bersamaan para elit agama menjadi kehilangan kharismanya akibat kepentingan umat yang didominasi oleh kepentingan

kelompok atau pribadi. Hal ini diungkapkan oleh Ustadz muda FK, bahwa Ulama yang sudah terjun ke dunia Politik Praktis dia bukan lagi ulama namun menjadi sosok Politisi yang berprilaku birokrat dan Prosedural.

Peperangan kancah Politik yang menggunakan issu Politik identitas akan berefek besar, karena jika seorang Ulama yang terjun dalam kancah politik dan tidak terpilih akibatnya akan merosotkan kridibilitas dan menghilangkan Kharismanya sebagai tokoh panutan.

Apakah Ulama tidak boleh berpolitik, karena politik itu kejam dan sangat sadis, responden menjawab itu adalah hak anak bangsa silahkan dunia Politik itu terbuka siapa saja boleh masuk, namun juga harus dipikirkan efek dari proses itu tidak jarang Ulama juga mengambil jalan pintas yaitu mengikuti jalur money politik dan ini sifat spekulatif yang jelas dilarang oleh agama, inilah yang menjadikan ulama-ulama ini tersungkur jika dia tidak terpilih dalam Pemilu. “Saya akan tetap menjadi Guru dan mengajarkan agama buat umat, saya tidak tertarik dengan dunia politik, bukan tidak punya modal, Insha Allah jika Allah menghendaki saya akan dapatkan kursi jabatan itu, namun saya akan kehilangan murid-murid saya, simpatisan saya dan meskipun saya menjadi pejabat namun hati nurani saya tetap akan tidak merasa nyaman, karena Tuan Guru atau Ulama itu

adalah miliki masyarakat dan hidup ditengah-tengah masyarakat, banyak tawaran dari Parpol namun saya tolak, karena saya hanya ingin bersama umat" (Ustadz ZI)

Selanjutnya Ustadz ZI mengatakatan, "program kita sama-sama sepakat dengan MUI Surabaya mereka juga tidak mempermasalahkan lagi masalah pemilu ini, atau pas pertemuan atau kunjungan itu kami tidak ada membicarakan masalah politik kami Insya Allah kami adem-adem aja. Jadi Insya Allah kami ada membangun MUI untuk mendinginkan masyarakat. Ya, memang sebagian orang itu ada aja, kami tidak ikut secara langsung dalam politik itu kalau lembaganya. Tapi pa, saya itu termasuk tidak ingin diam kalau ada yang ada tidak ada keadilan itu, seperti netral itu Pa, rasulullah aja berpolitik jadi ulun kada mau diam, contoh ada diantara calon walikota atau gubernur yang satu muslim yang satu nonmuslim masa kita milih non muslim. Jadi memang banyak itu Pa komen-komen masa MUI itu ikut. Karena memang melihat situasi dan keadaan ini melihat para ijtima para ulama itu sudah istikharah. Ya mudahn 5 tahun kedepan itu kaya agama mau dihapus ngeri sekali. Dan saya sama sekali tidak sependapat dengan Islam Nusantara karena islam itu rahmatan lil alamin. Jadi pada intinya pa, pemilu yang ini termasuk yang paling kurang baik. Contohnya orang-orang yang menghina agama itu kada papa

dan disitu tidak ada keadilan dan yang kedua tidak ada kenetralan polisi ternyata kemaren anak-anak sekolah ada ngasih baju jokowi dari kepolisian disitu saya kurang jadi *prinsip ulun walaupun sendiri ja tetap ulun ni Pa, apa lagi banyak kawan jua pa.*

B. Efek Politik Identitas sebagai Realitas Sosial

Bagaimana cara Ulama memengaruhi Pemilih, responden menjawab agak seragam yaitu pada kesempatan-kesempatan tertentu waktu ceramah atau kunjungan tertentu beliau mengajak kelompoknya untuk mendukung Calon Legislatif atau Capres tertentu, meskipun Beliau bukan sebagai kontestan atau timsis Capres tertentu. "Ini realitas, ada ulama yang tidak mencalonkan diri bahkan bukan timses Capres tertentu tetapi beliau mengajak mengarahkan kelompoknya untuk memilih Caleg atau Capres tertentu" (KH.S). Partisipasi seperti ini banyak dilakukan ulama, " *ya saya hanya simpati saja kepada yang bersangkutan, karena visi misinya bagus dan dia seiman dengan saya*." Inilah alasan beliau ikut mengampanyekan seseorang Calon Pemimpin. Hal ini kadang mengundang pro dan kontra dari kelompoknya sendiri, hingga muncul pertanyaan jamaah " *kenapa Guru mamilih urang itulah,*

padahal....." pada skala kecil hal ini bukan terlalu bermasalah, namun ini akan mengembang pada mosi umat kepada Ulama "*Nah Guru kita masuk angin, atau .....*).

Kelompok-kelompok, masyarakat yang heterogen ini akan bereaksi jika salah satu tokoh agamanya cendrung ke pigur Caleg atau Presiden. Yang tentunya mengundang perdebatan diwarung kopi atau bahkan di masjid. Jika tanggapan itu positif maka ulama itu akan diikuti oleh warganya, namun jika bertentangan dengan kleinginan masyarakat bawah rumput maka tidak segan-segan ulama akan di cap sebagai Guru abal-abal atau guru makan sogokan.

Potensi perpecahan masyarakat akan semakin kuat jika ulamanya tidak memiliki kearifan dan bijaksana. Ulama yang berpihak pada kelompok tujatan Dario ertentu karena mendukung ulama juga akan berpeluang mendapat hujatan dari warga kelompoknya dan ini bisa meluas kemana-mana yang bisa beruujung konplik horizontal sesame masyarakat.

Gejala perpecahan dan konplik inters ini dirasakan selama Pilpres dan Pileg. Menyikapi ini Majelis Ulama Islam (MUI) menyikapinya beragam, Kabupaten Barito Utara merasa aman-aman saja tidak ada reaksi berlebihan jadi tidak perlu disikapi dan reaksi berlebihan, hanya saja tetap waspada.

Kabupaten Kotawaringin Timur, bersikap waspada karena telah melihat potensi konplik sudah mulai muncul, aparat keamanan dan bersama steakholder lainnya meminta pendapat MUI untuk menilai situasi. Langkah ini sudah tepat karena profokator setiap detik,menit meracuni pikiran masyarakat dan Alhamdulillah berkat kesigapan semua unsur, baik Kepolisian, Dandim dan Pemda sera MUI semua permasalahan dapat diatasi dan sampai terakhir kegiatan Pemilu tidak ada reaksi yang menimbulkan konplik horizontal dan suasana masyarakat Kotawaringin Timur aman dan terkendali.

Di Kota Palangkaraya, dinilai aparat cukup aman dan damai. Efek Pemilu memang agak memanas seminggu sebelum Pemilihan dan seminggu setelah pemilihan, namun berkat kesigapan aparat dan tokoh-tokoh agama atau Ulama yang segera terjun kelapangan untuk menenangkan masyarakat, Alhamdulillah suasana aman dan damai (Ustdz.A)

Politik Identitas jelas akan menimbulkan efek konplik yang tidak sedikit seperti diungkapkan oleh Cresida Heyes dan Stuart Hall tentang politik identitas akan ada benturan-benturan yang menimbulkan konflik, otomatis rentan terjadi, meminjam istilah Tariq Ali, rentan terjadi *"clash of fundamentalists"* dalam kehidupan masyarakat, atau Huntington dengan lebih ekstrim mengatakan, "*clash of*

civilization" dimana keduanya merupakan cacat dalam demokrasi.

Data penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa kategorical Ulama, dilihat dari jawaban Responden terdapat 3 tife Ulama yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu Ulama yang **moderat** adalah ulama Struktural yang cendrung berpendapat mengambil jalan tengah, namun memiliki *girrah* untuk tetap berpegang pada Ukhuwah Islamiyah dan menurut pandangan ulama ini Politik Identitas adalah salah satu alat perjuangan untuk kemajuan Islam "*...Ulama ini miliki umat dan saya tidak boleh mempengaruhi hak umat untuk memilih, hanya saja saya berpesan kepada umat agar pilihlah yang beriman, taat beribadah dan peduli sama agama dan masyarakat kecil (Ustadz R).*

C. Upaya Penenang Kembali Suasana masyarakat

Setelah memanas beberapa bulan, Ulama banyak berpihak pada Capres-capres di dua kubu baik 01 maupun 02, hingga masyarakat banyak terpecah hingga memerlukan upaya peregangan dengan upaya Islah di kedua kubu. Tanggapan Responden beragama, ada yang menagatakan upaya islah harus dilakukan oleh Ulama yang netral untuk menyatukan kembali

ulama yg terserak di dua kubu dukungan mereka. Namun ada juga beberapa pendapat responden bahwa tidak ada Istilah Islah dalam politik, karena semua kubu merasa benar pada posisinya. Tidak ada yang merasa bersalah semua merasa benar jadi apa yang diislahkan (Ustadz FK). Namun ada beberapa responden menyatakan bisa saja upaya islah oleh lembaga atau ulama yang tidak berpihak sehingga semua bisa legowo menerima hasil Pemilu. Hal ini dibantah oleh salah seorang Ustadz di Palangkaraya, katanya "*manalah mungkin kita setuju dengan hasil yang kotor dan curang, jika kita setuju berarti kita merestui upaya kotor itu*" . Jadi upaya Islah tidak ada, biar saja waktu yang mendinginkannya atas Kuasa Allah yang maha membolak-balikan hati manusia.

Kehawatiran adanya gejolak memang agak beralasan karena panasnya suasana politik di masa pelaksanaan Pemilu, namun ternyata keadaan tidak seperti yang kita bayangkan, dan setiap daerah di 3 Kabupaten ternyata kondusip dan terkendali seperti diungkapkan oleh Ustadz Haderi *"Mun ulun sementara di Lahei ni masyarakat nya adem adem aja masalah itu kan, hampir hampir seolah-olah kedida gejolak Kitu nah santai santai aja seberataan. Paling Ulun menjaga pondok Ulun ni ay supaya, ya salah satunya lah jika Ulun terang terangan mendukung 1 atau 2 kedida kekhawatiran, mustia Ulun mendukung kalah*

pondok kita ni kena imbasnya, kita berurusan dengan pemerintah kan akhirnya apa apa kan. Untuk di Lahei rasanya hampir kedida gejolak nya, sampai bekalahi pander atau beanu, santai santai aja. Amun di Teweh Ulun kurang tahu, jarang Ulun ni ke Teweh, kecuali urusan itu aja, urusan ruqyah, hampir tidak tersentuh ulun masalah politik ni."

Kondisi ini menunjukan betapa Pemilu itu masih dianggap bukan sebuah pertaruangan namun hanya perhelatan politik yang tidak terrlalu dipusingkan oleh masyarakat. Pemilu yang sukses adalah pemilu yang tidak meninggalkan masalah yang sangat serius. Politik Identitas ternayata hanya sebuah fenomena sejenak, terbukti selesai pemilu dan akan nampak prilaku politisi jika ia berhasil dengan upaya Politik identitas, maka setidaknya aka nada konstribusi kepada masyarakat pemilihnya, jika gagal maka aka ada konsekwensi psikologis yang mungkin akan memakan waktu yang lama untuk merehabilitasinya.

BAB V
P E N U T U P

A. Simpulan

Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Politik Identitas masih tetap ada dan digunakan oleh politisi dalam rangka mencari dukungan eksistensi politik. Sebagian ulama baik structural maupun non structural memiliki persepsi bahwa politik Identitas khususnya keagamaan diperlukan dalam menuntun atau memberikan pandangan kepada jamaah dalam menentukan pilihan Paslon terpilih dalam rangka memelihara kepentingan umat dan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena Politik identitas di tengah kancah perpolitikan Indonesia disatu sisi ia adalah momok bagi demokrasi Indonesia, namun disisi lain ia menjadi alat ampuh dalam mendulang

suara Pemilih. Responden sepakat bahwa Politik Identitas masih digunakan Politisi dalam mendulang suara Pemilih

2. Disisi lain beberapa Ulama baik Struktural maupun non structural cendrung memandang tidak perlu adanya Politik Identitas keagamaan dalam menentukan pilihan Politik, dilihat dari prespektif ini sepertinya ulama berhati-hati dan agak tertutup dalam memberikan ulasan perlu tidaknya Politik Identitas Keagamaan itu dilakukan oleh Politisi di kalangan ulama. Data penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa kategorical Ulama, dilihat dari jawaban Responden terdapat 3 tife Ulama yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu Ulama yang **moderat** adalah ulama Struktural yang cendrung berpendapat mengambil jalan tengah, namun memiliki *girrah* untuk tetap berpegang pada Ukhuwah Islamiyah dan menurut pandangan ulama ini Politik Identitas adalah salah satu alat perjuangan untuk kemajuan Islam.

3. Majelis Ulama Indonesia di Kalimantan Tengah sejak awal sudah memberikan masukan dan saran kepada pihak Pemerintah dalam rangka meminimalisir konplik baik sebelum Pemilihan Umum maupun pasca Pemilihan Umum dan Majelis Ulama Indonesia bersama-sama dengan ulama tradisional berupaya terus menerus merekatkan umat untuk

terus menjalin ukhuwah baik sesama muslim dan menjalin hubungan baik dengan agama lain. Kondisi ini menunjukan betapa Pemilu itu masih dianggap bukan sebuah pertarungan namun hanya perhelatan politik yang tidak terrlalu dipusingkan oleh masyarakat.Kehawatiran adanya gejolak memang agak beralasan karena panasnya suasana politik di masa pelaksanaan Pemilu, namun ternyata keadaan tidak seperti yang kita bayangkan, dan setiap daerah di 3 Kabupaten ternyata kondusip dan terkendali seperti diungkapkan oleh Ustadz Haderi *"Mun ulun sementara di Lahei ni masyarakat nya adem adem aja masalah itu kan, hampir hampir seolah-olah kedida gejolak Kitu nah santai santai aja seberataan. Paling Ulun menjaga pondok Ulun ni ay supaya, ya salah satunya lah jika Ulun terang terangan mendukung 1 atau 2 kedida kekhawatiran, mustia Ulun mendukung kalah pondok kita ni kena imbasnya, kita berurusan dengan pemerintah kan akhirnya apa apa kan. Untuk di Lahei rasanya hampir kedida gejolak nya, sampai bekalahi pander atau beanu, santai santai aja. Amun di Teweh Ulun kurang tahu, jarang Ulun ni ke Teweh, kecuali urusan itu aja, urusan ruqyah, hampir tidak tersentuh ulun masalah politik ni."*

Pemilu yang sukses adalah pemilu yang tidak meninggalkan masalah yang sangat serius. Politik Identitas ternayata hanya sebuah fenomena sejenak, terbukti selesai pemilu dan akan nampak prilaku politisi jika ia berhasil dengan upaya Politik identitas, maka setidaknya aka nada konstribusi kepada masyarakat pemilihnya, jika gagal maka aka ada konsekuensi psikologis yang mungkin akan memakan waktu yang lama untuk merehabilitasinya.

B. Rekomendasi

1. Pilpres sudah usai, marilah kita kembali bergandengan tangan untuk sama-sama membangun bangsa ini
2. Politik identitas cendrung menjadikan Pimpinan kita ekslusif dan bersifat elit, oleh sebab itu untuk meminimalisir Politik Identitas memerlukan waktu buat pembelajaran Politik dengan baik kepada masyarakat.
3. Untuk merekatkan kembali agar suasana kembali damai dan tenang diperlukan upaya serius dari semua pihak untuk merangkul semua elemen yang sudah terpecah efek dari perhelatan pemilu

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta, The Wahid Institute, 2009)

Barker, Chris, *Cultural Studies, Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 1999.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Dean G dan Jeffrey Z Rubin Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004..

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Pendidikan Multikultur*, Jakarta: Karya Agung, 2005.

Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Ed Husain, *The Islamist*, (London: Penguin Books, 2007)

Erawati, Desi. Fimeir Liadi. Khairil Anwar, 2018. *Politics Identity and Electoral Contestationamong the Bakumpai Tribes (a Geopolitical survey at Central Kalimantan)Subtitles: Politics Identity, Prespective Political Education on Beginner Voters*, Atlantis Press. 2019

Habuddin, Muhtar, "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, dalam Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 3, No. 1 Februari 2012.

Koentjaranigrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000..

Liliweri, Alo, *Dasar-dasar Komunikasi antar Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta: Democracy Project, 2012.

Mahfud MD, "Kritik Kempanye Gatot Nurmantyo di Sumatera Utara" dalam *Tribun Pekan Baru. Com*, tanggal 27/06/2018.

Margono, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Moeldoko, Politik Identitas Merusak Demokrasi", dalam *Kantor Staf Presiden (ksp.go.id)*, 04 Juni 2018.

Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta, Erlangga, 2003)

Qodir, Zuly dan Syahbuddin latief, "Kelangsungan dan Perlawanan Politik Identitas dalam Bingkai Keadaban Demokrasi", dalam *Journal of Government and Politics*, 2011.

Robert Bala, *Peran Orang Kristen Menyikapi Fundamentalisme Agama*, dalam http://www.SVdjawa.org/opini 3. htm/

Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refikha Aditama, 2010.

Soejoeti, Sunanti Zalbawi, "Paradigma Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Permasalahannya," *Media of Health Research and Development* 9, no. 3 (February 1, 2013), https://doaj.org.

Suryani dan Ana Sabhana Azmy, " Politik Identitas dan Nasionalisme Kebangsaan (Studi atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tinghoa di Indonesia Pasca Orde Baru)", dalam http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34074

Syamsuddin, Din "Politik Identitas SARA Melekat di Diri Manusia, dalam *Detik News*, 3 Juli 2018.

Tanasaldy, Taufik, "Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat" dalam *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Obor, 2007.

Widyastono, Herry, "Metodologi Penelitian Alamiah dan Alamiah," accessed September 22, 2018, http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/398.

Yamsi, Nur, "Politik Identitas, Mengkhawatirkankah?" dalam *Republika, co.id*, 25 April 2018.

Yaqub, Mustafa Ali, "Kriteria Ulama Ahli Waris Nabi", dalam *Islam Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Internet

http: // www. Bangunsuporter.blogspot.com.2007
http://www.munindo.brd.de/milis
http://www.akufaraya.com/
http: //www.sabdaspace.org/pluralisme_
agama_dan_dialog/http://islamlib.com/id/
http://cetak.kompas.com/ http: //www. geocities.com/
http: // www. Kompas Com. 2008 http:// www. Opini Pos Kupang, 2008

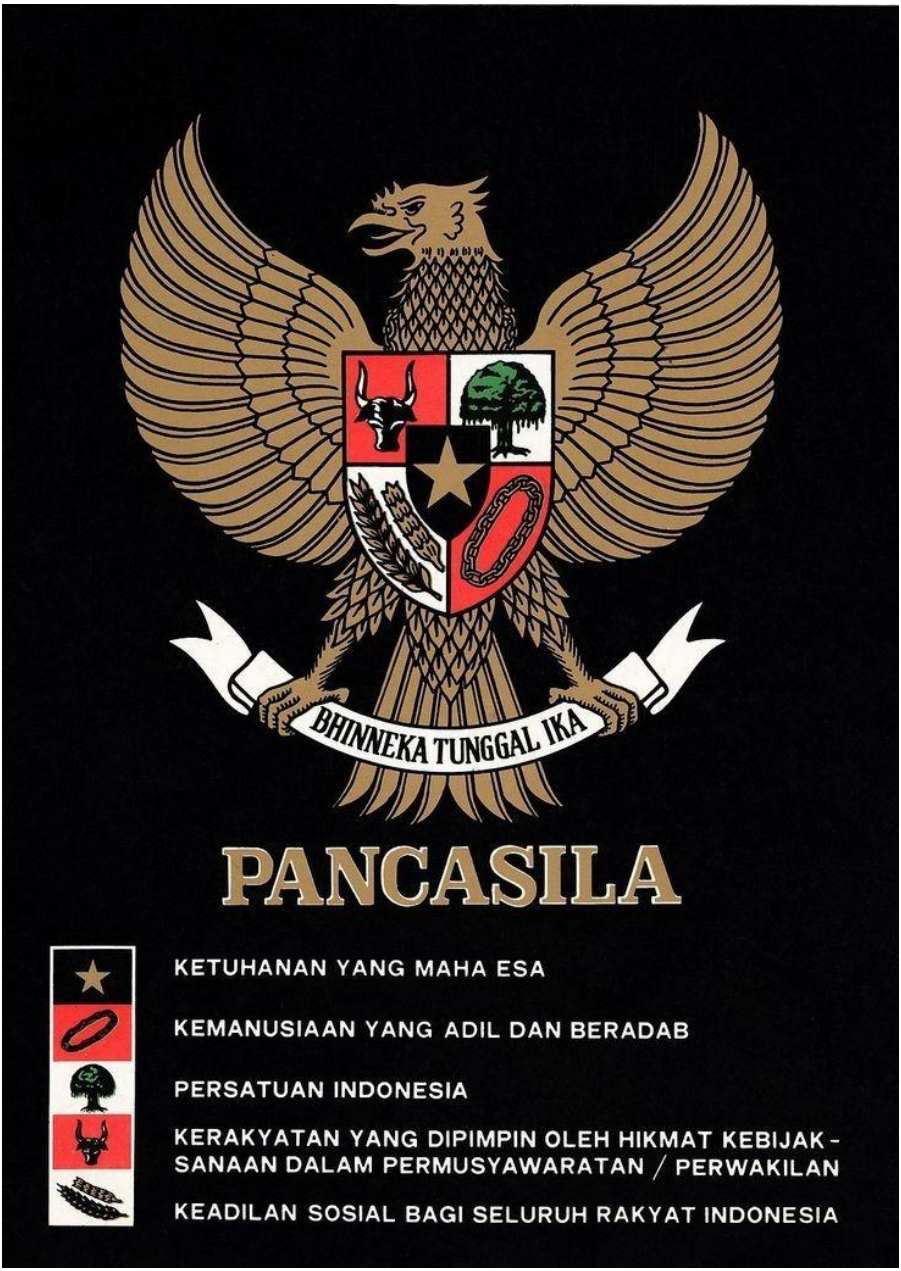
BHINNEKA TUNGGAL IKA
PANCASILA
KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
PERSATUAN INDONESIA
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PALANGKA RAYA

KALIMANTAN TENGAH – INDONESIA

https://iain-palangkaraya.ac.id

SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM

2019
PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

01

CALON PRESIDEN
Ir. H. JOKO WIDODO

CALON WAKIL PRESIDEN
Prof. Dr.(H.C.) KH. MA'RUF AMIN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

PDI PERJUANGAN · PARTAI GOLKAR · PKB · Partai NasDem · PPP · HANURA · PKP INDONESIA

02

CALON PRESIDEN
H. PRABOWO SUBIANTO

CALON WAKIL PRESIDEN
H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

GERINDRA · PKS · PAN · PARTAI DEMOKRAT